

Eks Bupati Tanimbar Diduga Korupsi Rp 7,2 M

TANIMBAR, BN - Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku, Petrus Fatlolon (58), kini berhadapan dengan dua perkara korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 7,2 miliar. Ia menjadi tersangka terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan penyertaan modal PT Tanimbar Energi pada 2020-2022.

Petrus mulanya ditetapkan sebagai tersangka kasus SPPD fiktif pada 2024 lalu. Penyidik menduga Petrus melakukan penyelewengaan anggaran perjalanan dinas tahun 2020.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Petrus Fatlolon.

RATUSAN MILIAR APBD JATIM BERMASALAH

□ BPK Temukan 21 Kelemahan Pengendalian Intern

SURABAYA, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

TEMUAN tersebut terjadi dalam ResUME Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Keten-tuan Peraturan Perundang-

undangan nomor 41.B/LHP/XVIII.SBY/2024 tertanggal 30 April 2024.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa

Timur menemukan sebanyak 21 kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada A. Penyusunan Laporan Keuangan, B. Pengelolaan Pendapatan Daerah, C. Pengendalian Belanja Daerah dan D. Pengelolaan Aset Daerah. Dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Penerapan dan peng-

aturan kebijakan akuntansi pengakuan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahaan (SAP)

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Gubernur Khofifah saat menyampaikan pendapat akhir penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2026, dalam Paripurna DPRD Jatin, Sabtu (15/11/2025).



Aris Mukiyono, M.T., M.M.,
Kepala Dinas ESDM



Ir. Edy Tambeng Widjaja, S.T.,
Kepala Dinas PU Bina Marga



I Nyoman Gunadi, S.T., M.T.,
Kepala Dinas Cipta Karya

Kepala Dinas PUPRKP Kota Malang Patut Diperiksa

□ Diduga Rugikan Keuangan Daerah Rp 1,4 Miliar

MALANG, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur berhasil mengungkap kerugian keuangan daerah dibalik pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kota Malang.

Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian intern atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab kepala

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Koresponden Liputan Khusus BN menunjukkan tanda terima surat Konfirmasi. (tody)

Desa Ngoro Digelontor Dana Desa Rp 1.026 Miliar

MOJOKERTO, BN - Pemerintah Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto kembali mendapat kucuran Dana Desa Rp.1.026.250.000. Anggaran itu mengalami kenaikan sebesar Rp.88.259.000 atau 09.51% dibandingkan dengan tahun 2024 dengan pagu penyaluran seluruhnya sebesar Rp.937.991.000.

Tentu kenaikan Dana Desa Ngoro tersebut membawa dampak peningkatan kualitas pelayanan public dan tercapainya

rencana pembangunan infrastruktur desa, hingga pemberdayaan UMKM guna mewujudkan kesejahteraan segenap warga desa Ngoro.

Berdasarkan dokumen realisasi penyaluran dana desa Ngoro Tahun 2025 yang di terima bidiknasional.com mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.026.250.000 dengan realisasi penyaluran pertanggal 23

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

KPK Pamer Duit Korupsi Rp 883 Miliar

JAKARTA, BN - KPK menyerahkan Rp 883 miliar dari hasil kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen kepada negara. Dalam penyerahan itu, KPK sempat memamerkan Rp 300 miliar. Uang rampasan itu dipamerkan di ruang konferensi pers gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025). Tumpukan uang yang dipamerkan terdiri atas pecahan Rp 100 ribu.

Tumpukan uang yang dipamerkan KPK itu belum mencapai Rp 883.038.394.268. Faktor keterbatasan ruangan membuat uang yang diperlihatkan ke publik hanya Rp 300 miliar.

Tumpukan uang yang dipamerkan itu setinggi 1,5 meter dengan panjang 7 meter. Total ada 300 boks plastik bening berisi pecahan uang Rp 100 ribu yang tiap masing-masing boksnya senilai Rp 1 miliar.

"Pada kesempatan siang hari ini, kita dapat hadir di sini dalam rangka serah terima barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen (Persero)," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (20/11).

Kasus investasi fiktif PT Taspen ini menjerat Dirut Taspen Antonius NS Kosasih (ANSK) dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Polda Usut Kasus Proyek Dinas Perkim Kabupaten Kediri

KEDIRI, BN - Kasus yang menjerat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri semakin mengerucut pada dua orang yang diduga akan menjadi tersangka. Proyek tahun 2022 di Dinas Perkim menjadi bola liar yang berkepanjangan. Puluhan kontraktor yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan penunjang langsung (PL) harus berhadapan dengan penyidik di direktorat Tindak Pidana Korupsi Subdit III (Tipkor) Polda Jatim.

Informasi yang didapatkan media ini di lapangan, puluhan kontraktor atau CV penggarap harus bergiliran memasuki ruang penyidik dengan membawa aplikasi data guna melengkapi kebutuhan penyidik atas temuannya.

Salah satu kontraktor yang tidak mau namanya disebutkan (nama -red) mengatakan pada media ini bahwa kasus ini sudah sejak 2024 dan kami sudah beberapa kali dipanggil dihadapan penyidik Tipkor Polda Jatim.

"Awalnya kami kaget mendapatkan panggilan Polda Jatim, masak pekerjaan PL harus diperiksa Polda. Padahal kami sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi intruksi

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL Membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/C14 Blur Permai, Blur Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

Memanas, 38 Rumah di Jumput Rejo Sukodono Dieksekusi PN Sidoarjo



Eksekusi PN Sidoarjo di Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Suasana tegang mewarnai eksekusi lahan seluas 7.798 meter persegi di Desa Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono, Selasa (19/11). Eksekusi dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan pengosongan lahan. Sebanyak 38 rumah yang berdiri di atas tanah tersebut menjadi objek eksekusi. Banyak penghuni mengaku terkejut karena tidak mengetahui status sengketa lahan yang mereka tempati.

Ketua Panitera PN Sidoarjo, Rudy Hartono, menggaskan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan. "Dalam amar putusan disebutkan tanah seluas 7.798 meter

persegi harus dikosongkan oleh tergugat atau pihak yang memperoleh hak dari," jelas Rudy di lokasi.

Lahan tersebut sebelumnya dijual secara kavling oleh PT Ciptaning Puri Wardani. Kini puluhan rumah telah berdiri dan dihuni sejak bertahun-tahun lalu.

Pembacaan putusan di lokasi sempat memicu situasi memanas. Sebuah LSM hadir dan terlibat adu argumen dengan aparat keamanan yang berjaga.

Ketegangan meningkat karena sebagian penghuni mengaku tidak pernah mengetahui bahwa lahan tersebut memiliki persoalan hukum. Mereka merasa dirugikan oleh pihak pengembang melalui komunikasi intens

Pihak Desa Jumput Rejo juga menegaskan bahwa para penghuni bukan warga desa setempat berdasarkan data resmi pemerintah desa. Pernyataan ini memicu perdebatan baru terkait legalitas keberadaan para penghuni.

Rudy mengungkapkan bahwa pemohon eksekusi telah mengajukan permintaan khusus agar proses pengosongan tidak disertai pembongkaran bangunan.

Pemohon memohon agar yang dikosongkan hanya barang dan penghuni saja, sementara bangunan tidak perlu dirobohkan. Penyelesaian bangunan akan dimusyawarahkan setelah eksekusi," ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa permintaan tersebut, eksekusi seharusnya dilakukan dengan meratakan bangunan sebagai alasan tercantum dalam amar putusan. Namun pengadilan tetap bekerja sesuai penetapan resmi yang diterima.

Di lapangan, sejumlah rumah mulai dikosongkan dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Meski sempat terjadi ketegangan, situasi perlakuan kondusif

antara petugas, penghuni, dan pihak pengadilan.

Batas-batas lahan yang dieksekusi telah jelas tercantum dalam putusan. Bagian utara dan selatan berbatasan dengan saluran air, timur dengan tanah milik Suparlan, dan barat dengan PT Mutiara Mansur Sejahtera.

Aparat keamanan menegaskan bahwa langkah pengamanan diperlukan untuk mencegah situasi semakin panas. Mereka memilih pendekatan persuasif untuk menenangkan warga. Sejumlah saksi mata menilai aparat cukup kondusif dalam menjaga stabilitas. Warga penghuni kavling mengaku tidak pernah diberi informasi terkait sengketa antara pengembang dan pemilik lahan sebelumnya.

Rudy berharap seluruh pihak dapat menerima dan menghormati proses hukum yang berjalan. "Kami menjalankan amar putusan demi kepastian hukum dan hak para pihak. Setelah eksekusi ini, ruang musyawarah antara pemohon dan pemilik bangunan tetap terbuka," pungkasnya.

(Teddy Syah)

Jaga Integritas Pelayanan Publik, Inspektorat Jombang Gelar Sosialisasi Larangan Gratifikasi, Suap dan Pungli

JOMBANG, BN - Melenggarakan sosialisasi larangan gravitasi, suap dan pungutan liar (pungli) salah satu meningkatkan integritas, transparan, dan akuntabilitas, aparatur pemerintah. Tujuannya adalah agar peserta memahami aturan terkait gravitasi.

Karena itu Inspektorat Kabupaten Jombang terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. Maka melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), lembaga ini rutin menggelar Sosialisasi Larangan Gratifikasi, Suap, dan Pungutan Liar (Pungli) dalam pelayanan publik.

Disampaikan oleh Kepala Inspektorat Jonbang, "Kegiatan ini adalah kegiatan rutin setiap Selasa di minggu terakhir setiap bulan, dan yang terbaru akan dilaksanakan pada Selasa (21/10) ini," ujar Abdul Madjid Nindyagung, Kepala Inspektorat Jombang.

Disampaikan oleh Agung lagi, "Kegiatan ini merupakan langkah nyata menjaga integritas pelayanan publik. Gratifikasi, suap, dan pungli bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan mencoreng citra ASN," jelasnya. "Sosialisasi ini tak hanya menyasar ASN, tetapi juga masyarakat, mitra kerja, hingga vendor pemerintah," ujarnya.

Selain itu edukasi dilakukan secara luas, baik melalui siaran radio terestrial maupun radio streaming agar bisa diakses dari mana saja. "Kami ingin pesan antikorupsi menjangkau semua pihak, agar tidak ada ruang bagi praktik-praktik menyimpang dalam pelayanan publik," ujar Agung.

Pada acara sosialisasi yang diadakan oleh Inspektorat Jombang, hadir sebagai narasumber Drs. Purwanto, M.KP



Sosialisasi Larangan Gratifikasi, Suap dan Pungli Digelar Inspektorat Jombang.

selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Eko Prasetyo, SE, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi yang juga Penyuluh Antikorupsi.

Menurut Agung, "ASN wajib memahami perannya sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang Aparatur Sipil Negara. "ASN harus melayani, bukan dilayani. Integritas dan moralitas menjadi kunci utama agar layanan publik semakin berkualitas," ujarnya.

Setidaknya masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti budaya birokrasi yang kaku, rendahnya kompetensi dan integritas, serta mentalitas "dilayani". Hal-hal tersebut kerap membuka celah terjadinya praktik suap atau gratifikasi.

Maka cara mengatasinya, Inspektorat bersama Pemkab Jombang melakukan berbagai upaya, mulai dari preventif, detektif, hingga represif. Langkah pencegahan dilakukan lewat sosialisasi, penyederhanaan prosedur layanan, digitalisasi, hingga penguatan pengawasan internal.

Melalui tahap detektif diterapkan sistem pelaporan terbuka dan perlindungan whistleblower. "Kami juga dorong penerapan Zona Integritas di tiap instansi agar budaya antikorupsi benar-benar menjadi kebiasaan kerja," ujar Madjid.

Selanjutnya untuk sisi penindakan, Pemkab Jombang menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pungli dan suap. "Penindakan ini bukan sekadar hukuman, tapi juga bentuk efek jera agar pelayanan publik semakin bersih," tegasnya lagi.

Kegiatan bersifat edukatif dan interaktif untuk memahami peserta memahami resiko gravitas dan mekanisme peloperannya. (Tek)

Inovasi E-Kenda, Bupati Sidoarjo Subandi Raih Penghargaan Tingkat Nasional



SIDOARJO, BN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, Sidoarjo berhasil menyabet Bhumandala

Kanaka (Emas) untuk kategori Pemerintah Kabupaten.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan atas keberhasilan Sidoarjo menghadirkan inovasi E-Kenda (Elektronik Kendali Daerah), sebuah sistem pemetaan lokasi paket pekerjaan fisik yang memudahkan pengendalian pembangunan secara transparan dan terukur.

Penghargaan Bhumandala Kanaka diserahkan oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahannya Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, kepada Bupati Sidoarjo Subandi di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional RI, Selasa (18/11/2025).

"Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini, dan kami tegaskan bahwa ini merupakan keberhasilan kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bupati Subandi.

Ia menjelaskan bahwa inovasi E-Kenda diusulkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sidoarjo. Sistem tersebut memastikan seluruh proyek fisik dapat dipantau secara digital sehingga lebih efisien dan akuntabel.

Keberhasilan ini mempertegas komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan di era digital.

"Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Sidoarjo yang selalu mendukung upaya pembangunan," lanjut Subandi.

Ia berharap penghargaan tersebut mampu mendorong semangat kolaborasi dan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

"Seluruh OPD dan pegawai Pemkab Sidoarjo harus terus berinovasi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik," tegasnya. (Teddy Syah)

Cewek Panggilan MiChat Tewas Dicekik di Hotel GI Juanda



SIDOARJO, BN - Wanita bernisial SS ditemukan tewas di kamar Hotel GI, Jalan Raya Bypass Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Jumat (14/11/2025) dini hari.

Jenazah tersebut merupakan korban penganiayaan dan pembunuhan. Polisi berhasil menangkap Febri Latif Bimo Nugroho (28) sebagai pelaku pembunuhan.

Informasi yang diterima, polisi menerima laporan jika ada orang tak sadarkan diri dari seorang rekan korban. Selanjutnya polisi mendatangi lokasi.

Korban selanjutnya dibawa ke RS Sheila Medika. Namun, nyawa perempuan berusia 32 tahun tersebut tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Pelaku dan korban sebelumnya berkomunikasi melalui aplikasi MiChat untuk transaksi open BO dengan tarif Rp 4,5 juta. Keduanya kemudian bertemu di kamar 101 Hotel GI, pada Kamis (13/11/2025).

Pelaku dan korban dua kali berhubungan badan hingga sekitar pukul 23.00 WIB. Memasuki pukul 01.00 WIB, pelaku membungkam korban untuk sesi ketiga sesuai kesepakatan. Pelaku kemudian mencekik korban dengan kedua tangan, lalu memastikan korban tidak bergerak dengan menutup wajahnya menggunakan bantal.

Usai itu, pelaku hendak melarikan diri. Namun aksi tersebut dipergoki teman korban, Neng Piya Pidiyanto yang datang menjemput. Korban ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dengan wajah tertutup bantal. Jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk autopsi.

"Mohon koordinasi unit pidum polresta enggih karena diamankan di polresta dan ditangani oleh unit pidum," kata Kapoldak Gedangan AKP Anak Agung Gede Putra Wisnawa, Minggu (16/11/2025). Polresta Sidoarjo masih melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap FN dan mendalami motif pelaku. (yah)

Khofifah Lantik 580 Pejabat Administrator dan Pengawas

SURABAYA, BN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 580 Pejabat terdiri dari Pejabat Administrator sebanyak 246 orang dan Pejabat Pengawas sebanyak 334 orang di Gedung Negara Graha Surabaya, Jumat, (21/11).

Prosesi pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/13954/204/2025. Lantaran jumlah pejabat yang dilantik cukup banyak, proses pelantikan dilakukan dalam tiga sesi. Dengan rincian Sesi I dilantik sebanyak 194 pejabat, Sesi II sebanyak 174 pejabat dan Sesi III sebanyak 212 pejabat.

Pada mereka yang dilantik, Gubernur Khofifah meminta untuk segera memacu kinerja dan menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di masing masing unit kerja yang baru.

"Maksimalkan seluruh energi untuk menjalankan tugas dan pengabdian terbaik," ujar Gubernur Khofifah.

Pelantikan ini dikatakan Khofifah cukup penting karena ada sekitar 2.836 para ASN yang pensiun di tahun 2025. Sehingga melalui pelantikan, pejabat yang dilantik akan langsung mengisi banyak pos tugas.

Gubernur Khofifah mengingatkan agar seluruh pejabat yang dilantik bekerja secara dinamis, terukur, memiliki kecepatan serta profesionalisme yang tinggi.

"Provinsi provinsi lain bekerja juga menggunakan



Gubernur Khofifah memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik (Ist)

kecepatan dan profesionalisme yang sangat tinggi," ungkapnya.

Momentum pelantikan pejabat Administrator dan pengawas dimanfaatkan Gubernur Khofifah untuk mengajak sekaligus mengimplementasikan filosofi kerja bertajuk 'JATIM BISA' (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif) sebagai arah baru pembangunan Jawa

Timur. "Semangat JATIM BISA menegaskan bahwa Jawa Timur tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga pelaku utama dalam membentuk arah kemajuan bangsa," jelasnya.

Sebagai Gerbang Baru Nusantara, Gubernur Khofifah minta agar seluruh pejabat bisa cepat beradaptasi dengan perubahan dan penyesuaian terhadap dinamika regional, nasional maupun global. Adaptasi ini diharapkan bisa menjadi bagian dari implementasi merangkul semua sektor dalam membangun Jawa Timur.

Dicontohnya salah satu bentuk adaptasi terhadap dinamika global dibuktikan melalui menjaga lingkungan dan mengurangi emisi karbon melalui upaya menanam Mangrove diberbagai daerah di Jawa Timur. Pada saat memenuhi undangan program RISING FELLOWSHIP di Singapura, Khofifah menjelaskan peluang kerja sama di bidang _carbon trading_ sebagai bagian dari upaya menuju net zero emission. (dji)

Disnaker Jombang Gelar Bimtek K3 Pekerja Rokok Wanita

JOMBANG, BN - Pentingnya memberikan pelatihan K3 bagi para pekerja, membuka wawasan baru bagi pekerja. Meskipun pekerja mengetahui bahwa terdapat risiko ketika mereka bekerja tetapi mereka tidak mengetahui apa saja risiko tersebut. Dengan adanya pembekalan, pekerja bisa menambah pengetahuan serta wawasan baru mengenai tempat kerjanya.

Kepedulian Dinas Ketenagakerjaan (Diskaner) Kabupaten Jombang dengan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pemberian tablet tambah darah bagi pekerja wanita perusahaan rokok di PT Anugerah Mutiara Luhur Indonesia Jaya (MPS Perak), Jombang, sudah tidak diragukan lagi, berbagai program dan la-



Bimtek K3 Pekerja Rokok Wanita yang digelar Disnaker Jombang. (ist)

yanan disampaikan, Kamis (3/11).

Dalam kegiatan tersebut telah dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda-kab) Jombang Agus Purnomo mewakili Bupati Jombang, Warsubi, dan dihadiri oleh Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto beserta jajaran, para pejabat Pemkab Jombang terkait, serta Direktur MPS Perak Jombang,

Bimtek diikuti para pekerja dari perusahaan rokok MPS Perak Jombang.

Sementara itu untuk mewakili Bupati Jombang, Sekda-kab Agus Purnomo mengatakan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas

kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaiannya yang mengakibatkan penurunan produktivitas kerja.

Dengan adanya pembekalan dan manfaat atau fungsi K3 untuk pekerja kata Sekda-kab Jombang, yaitu pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan, serta pekerja memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan terkait dengan K3. Selain pekerja, Perusahaan sesuai ketentuan juga memiliki kewajiban dalam implementasi K3 di perusahaannya.

"Namun di atas semuanya, saya ingin memastikan bahwa seluruh pekerja di Kabupaten Jombang mendapatkan perlindungan yang paripurna," kata Sekda-kab Agus Purnomo.

(Tok)

Proyek Jembatan Dusun Banjaran Desa Kudu Banjar Beberapa Kali Gagal Lelang

JOMBANG, BN - Sejak tahun 2020 hingga kini, masyarakat Dusun Banjaran, Desa Kudu Banjaran menunggu perbaikan jembatan di dusunnya tak kunjung tiba. Sementara warga urunan sendiri dengan membuat jembatan dari darurat dari dana swadaya masyarakat.

Sehingga jembatan yang ada di Dusun Banjaran yang sangat sederhana, dan belum memadai untuk sarana transportasi yang memadai. Padahal jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat dusun setempat beraktivitas sehari-hari. Jembatan yang putus sejak tahun 2020 mengalami kerusakan atau putus sehingga tidak bisa dilewati, akhirnya atas kesepakatan bersama Warga desa, membangun jembatan sederhana dengan anggaran swadaya masyarakat, agar bagi pejalan kaki dan cukup untuk kendaraan roda dua bisa melewati nya, dan untuk kendaraan roda empat tidak bisa melewati karena tidak sesuai dengan ukuran lebar nya jembatan hasil swadaya tersebut.

Akhirnya proyek jembatan Dusun Banjaran direncanakan akan dibangun dengan anggaran Rp 2,9 Miliar. Ironisnya beberapa kali di lakukan lelang gagal tidak ada pemenuhan nya, sehingga batal dilaksanakan di tahun 2025.

Sebelumnya jembatan tersebut putus (jebol), sudah pernah ada perbaikan ketika itu di perbaiki / di bangun oleh dinas pengairan ketika kepala dinas nya Gutomo. Beberapa tahun setelah diperbaiki, jembatan Dusun Banjaran pada tahun 2019 menjelang pergantian tahun 2020 putus. Sungai banyak tumbuh tanaman enceng gondok bertebalan. Jika rencana berjalan memperbaiki jembatan Dusun Banjaran, berarti sudah dua kali berjalan perbaikan (dibangun) lagi.

Rencana jembatan penghubung antara Dusun Ketapang tengah dengan Dusun Banjaran tersebut tahun 2026 akan dilakukan lelang kembali untuk melaksanakan pembangunan kembali.

Kepala Desa Kudu Banjar berharap pengadaan proyek jembatan Dusun Banjaran berjalan lancar tanpa terkendala



Proyek jembatan dusun Banjaran, Desa Kudu Banjar yang gagal dilelang. (Tok)

saat lelang nanti. Selain itu warga Desa Kudu Banjar berharap rencana pembangunan jembatan tersebut tidak ada kendala apa-apa, masyarakat menunggu kepastian, agar sarana transportasi berjalan lancar.

Sementara ada desas desus kabar, bahwa anggaran di tahun 2025 serapan dari Dinas PUPR baru 58 %, sehingga menjadi penyebab kegagalan pembangunan jembatan tersebut, apa benar masih belum jelas adanya informasi tersebut. Saat itu pada lelang kedua, satu penawar yang ikut tender, akhirnya saat itu sistem otomatis menggugurkan, karena tidak ada pesaing. Bahkan lelang ketiga tidak berhasil, karena hanya dua peserta yang ikut, dan itupun tidak bisa lolos persyaratan administrasi dan teknis.

Akhirnya gagal lagi, sudah tiga kali, tidak ada yang berhasil, tahun 2025 pada pengadaan jembatan Dusun Banjaran, Desa Kudu Banjar gagal dan ditunda. Selain itu di tahun 2026 juga masih meragukan apakah kondisi keuangan daerah. Apa memungkinkan anggaran reguler APBD tahun 2026 reguler memungkinkan. Sementara masyarakat setempat menunggu kepastian pemerintah daerah

Menurut sebuah sumber, bahwa pada proyek jembatan Dusun Banjaran, Desa Kudu Banjar dikarenakan selalu gagal, diduga ini adalah generalisasi yang berlebihan. Namun memang sering kali muncul persepsi publik mengenai kegagalan dalam pelaksanaannya. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor kompleks, bukan karena disengaja dan dapat dikatagorikan sebagai "kegagalan lemahnya daerah" yang terjadi, ada dugaan saat intervensi pemerintah tidak menghasilkan hasil yang diinginkan," ungkapnya.

Sementara dari prediksi kegagalan lelang berkali-kali selalu gagal, karena kan, mungkin ada kesalahan dalam proses evaluasi, poin lelang Pokja (Pokja pemilihan) dapat melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengevaluasi dokumen penawaran yang menyebabkan hasil lelang di batalkan atau digugat dan harus dievaluasi ulang. (Tok)

Tingkatkan Kewaspadaan di Musim Hujan, DLH Surabaya Gencarkan Perampingan Pohon



Petugas DLH Surabaya saat merampingkan pohon. (ist)

SURABAYA, BN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya meningkatkan kewaspadaan di musim penghujan dengan menggencarkan program perantingan pohon secara rutin. Langkah ini dilakukan untuk memitigasi risiko pohon tumbang akibat angin kencang dan curah hujan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan

warga dan pengguna jalan.

Kepala DLH Kota Surabaya, Dedik Irianto, menjelaskan bahwa pemkot memiliki jadwal rutin untuk perantingan, khususnya di ruas-ruas jalan utama. Untuk memastikan pekerjaan berjalan optimal dan aman, tim lapangan dibagi ke dalam tujuh rayon, dengan target minimal meranting 20 pohon per hari di setiap rayon saat cuaca mendukung.

"Pada kasus-kasus khusus di daerah padat, seperti di Wiyung, perantingan bahkan dilakukan pada hari Minggu pagi. Kami bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan penutupan jalur sementara (contra flow) demi menjamin keselamatan petugas dan pengguna jalan," kata Dedik, Selasa (18/11/2025).

Dedik menambahkan bahwa selain jadwal rutin, masyarakat juga diberikan akses untuk berpartisipasi aktif. Warga dapat mengajukan permohonan perantingan melalui aplikasi Wargaku, bahkan untuk pohon-pohon yang berada di dalam area permukiman.

Selain perantingan, Pemkot Surabaya juga tengah menjalankan program peremajaan pohon di beberapa ruas jalan. Program ini dinilai krusial karena banyak pohon besar yang telah berusia puluhan tahun seperti pohon asem peninggalan Belanda di Jalan Ahmad Yani, berisiko mengalami keropos di bagian tengah meskipun dari luar tampak sehat.

"Pohon-pohon yang terlalu besar dan berisiko tinggi di tepi jalan raya akan diremajakan dengan jenis pohon yang lebih ideal. Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu lokasi utama peremajaan karena merupakan akses vital dan pintu masuk utama ke kota," jelasnya.

Ia menyadari bahwa proses peremajaan ini memerlukan waktu yang lama dan berbeda dengan pembangunan fisik. "Pohon membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh besar dan kembali menciptakan keteduhan yang kini dinikmati oleh warga," ujar dia.

Sebagai langkah preventif, Dedik juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar saat terjadi hujan lebat atau angin kencang. "Kami mengimbau agar warga menghindari pohon saat cuaca ekstrem. Hal ini demi mencegah bahaya kecelakaan yang diakibatkan oleh pohon tumbang, yang sering kali terjadi karena bagian dalam pohon sudah keropos," pungkasnya. (red)

Meski Jaksa Tolak Eksepsi 2 Terdakwa, Penasehat Hukum Harap Hakim Putus Adil

□ Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah



Agenda persidangan kali ini adalah tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan kedua terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, I Putu Kisnu Gupta menegaskan, surat dakwaan telah disusun secara profesional dan memenuhi unsur hukum. "Penuntut umum telah menyusun surat dakwaan dengan cermat, jelas, dan lengkap. Dakwaan kami disusun sesuai kaidah penulisan yang benar dan tidak ada kesalahan yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda," ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan telah dimasukkan, baik dakwaan Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 UU 31/1999 maupun Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dakwaan kami mempunyai dasar hukum yang sah. Karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan tidak diterima. Keberatan mereka tidak berdasar dan tidak menyentuh substansi perkara yang seharusnya dibuktikan dalam persidangan," tegaskannya.

Sementara itu, Penasihat hukum terdakwa Agoes, Descha Govinda mengatakan, tetapi menghormati sikap JPU yang menolak seluruh eksepsi pihaknya, meski ia menilai penyampaian tanggapan tersebut kurang jelas.

"Kita tetap menghargai jaksa sebagai penuntut. Tadi tanggapannya dibacakan agak kurang jelas, tetapi setelah saya baca, intinya memang menolak permohonan eksepsi dari kami," ujarnya.

Ia menyebut, pihaknya sebelumnya mempersoalkan dakwaan yang dianggap tidak cermat serta perhitungan inspektorat yang dinilai tidak tepat. "Yang kami anggap kemarin itu adalah dakwaannya tidak cermat, termasuk soal perhitungan Inspektorat. Tapi jaksa tetap menganggap dakwaannya lengkap dan sesuai tupoksi Pak Agoes Kami hormati itu. Semoga Majelis Hakim memutus seadil-adilnya," ungkapnya.

Senada dengan Descha, penasihat hukum terdakwa Heri Soesanto, Eman Mulyana, menegaskan salah satu alasannya mengajukan eksepsi adalah karena posisi klienya saat itu hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

"Kami mengajukan eksepsi karena Pak Heri saat itu hanya Plt Kadis Perkim CKTR. Itu yang kami sampaikan dalam keberatan kami," terangnya.

Majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada Senin, 24 November 2025, dengan agenda pembacaan putusan selanjutnya untuk menentukan apakah perkara ini akan berlanjut ke tahap pembuktian. Selain Agoes dan Heri, kasus ini juga menyeret nama pejabat lain, yakni Sulaksono (Kadis Perkim CKTR periode 2007-2012 dan 2017-2021) serta Dwijo Prawiro (Kadis periode 2012-2014). (Teddy Syah)



Pengacara Descha Govinda, PH Terdakwa Agoes Boedi Tjahjono selepas persidangan. (Teddy)

Rokok Ilegal Membudaya di Madura

SUMENEP, BN - Ditengarai kios-kios masih menyimpan rokok ilegal untuk dijual pada konsumen. Kabupaten Sumenep mengawasi dari tim gabungan Bea Cukai atau Satpol PP kurang sepenuhnya dalam tindakan atau pelarangan terhadap Gudang perusahaan rokok yang ada di lingkungan Sumenep atau datangnya dari kota.

Informasi dari sejumlah sumber yang terpercaya menyebutkan bahwa peredaran tidak dilakukan secara sembuni-semبuni, tetapi justru masif dan terang-terangan di wilayah Sumenep. Bahkan, produk ini telah ditemukan di banyak warung, kios, dan toko grosir tembakau, terutama di kecamatan - kecamatan, daratan lainnya.

Seorang pencandu rokok ilegal di Kecamatan Sumenep MH sering mengisap rokok tanpa pita Bea - Cukai dengan



Kantor Bea-Cukai Sumenep

alasan lebih murah dan terjangkau juga rasanya lumayan, walaupun tidak sepenuhnya sama dengan yang legal.

Nama H. F bukan asing di kalangan pelaku usaha di Sumenep. Ia dikenal memiliki banyak koneksi dan diduga telah lama terlibat dalam pendistribusian berbagai produk rokok, termasuk yang tak bercukai alias ilegal. Kini, dengan dugaan keterlibatannya dalam peredaran Genesis dan Jangger, Asmara Tea, Genesis dll.

Belum ada tindakan tegas dari Tim Gabungan seperti Bea Cukai, Polisi/TNI /CPM Bagian Perkonomian Pemkab Satpol PP. Kejaksaan, Bagian Hukum Pemkab dan Satpol PP. Sehingga pemerintah tidak dirugikan oleh perusahaan rokok ilegal yang sudah lama memproduktif. Harapan masyarakat

agar semua perusahaan rokok yang sudah lama beredar bisa di beri sanksi tegas sesuai UU Bea-Cukai. (yus)

Program Integrasi Wisata Religi oleh Pemerintah Kelurahan Ngargosari



Gapura Pintu Masuk Makam Ibunda Nyai Dewi Sekardadu. (Foto: Subhan Arif)

GRESIK, BN - Akhir bulan Oktober tahun 2025, menjelang sore, diteras atau ruang depan kelurahan Ngargosari kecamatan Kebomas kabupaten Gresik. Untuk kali yang kesekian tajuk silaturahmi awak media Cetak & Online Bidik Nasional berkunjung dan bertatap muka langsung dengan Lurah Sutisno.

Dibalut dialegtis percapakan, intonasi yang sama-sama kental jawa timur mengisyaratkan jiwa atau pribadi yang mengedepankan serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan antar bangsa. Menindaklanjuti inti dari hasil percakapan pada kali pertama pertemuan dengan awak media bersama Sutisno Lurah Ngargosari kecamatan Kebomas, Gresik. Bawa pekerjaan rumah apa yang bisa kami bantu memfasilitasi sesuai peran & fungsi pers media, tanya penulis.

Menegaskan atensi dari pemerintah kelurahan Ngargosari kecamatan Kebomas kabupaten Gresik bagi pemandangan pribadinya yakni di bidang pengelolaan sumber daya alamnya, respon spontan Sutisno menjawab.

Berkarakter khas putra

mungkin tidak cukup/tidak ada.

B a h w a undang-undang keterbukaan informasi publik mewajibkan setiap lembaga atau instansi yang sumber dana operasionalnya dari APBD (Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah) dan/atau bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara) agar menyediakan ruang informasi bagi publik.

Maka, mau ataupun tidak, Sutisno selaku Lurah senantiasa dan selalu menerima kedatangan awak media dengan sambutan yang sangat terbuka. Menindaklanjuti inti dari hasil percakapan pada kali pertama pertemuan dengan awak media bersama Sutisno Lurah Ngargosari kecamatan Kebomas, Gresik. Bawa pekerjaan rumah apa yang bisa kami bantu memfasilitasi sesuai peran & fungsi pers media, tanya penulis.

Menegaskan atensi dari pemerintah kelurahan Ngargosari kecamatan Kebomas kabupaten Gresik bagi pemandangan pribadinya yakni di bidang pengelolaan sumber daya alamnya, respon spontan Sutisno menjawab.

Rajin dan konsistensi menabung merupakan kunci utama, lanjut Velly, karena peserta harus konsisten menabung dari awal sampai akhir program. Kalau berhenti di tengah jalan, otomatis gagal. "Program ini kami canangkan mulai April 2023 selama 30 bulan, jadi sampai Oktober 2025 ini. Nasabah wajib menabung cukup dengan 100 ribu per-bulan secara rutin dan tertib. Ketentuan lain pada saat pengundian saldo minimal harus 3 juta, jadi rajin dan konsistensi menabung sangat diperlukan," jelasnya.

La menambahkan, untuk optimalisasi dan sukses program secara berkelanjutan seluruh pegawai Bank Daerah Kabupaten Madiun turut menjadi motor penggerak.

daerah yang berhias iman, Sutisno selaku Lurah kontan menekan keseriusannya, bahwa bila memang kepedulian serta keikutsertaan-nya insan pers media dalam mengawal serta turut membantu penyelenggaraan pemerintahannya, maka dirinya sangat menaruh harap.

Melalui destinasi wisata religi pesarean atau makam Ibunda Nyai Dewi Sekardadu, Sutisno mengharapkan dari peran dan fungsi pers media bahwa bagaimana agar tidak seperti pengunjung atau peziarah," ucapnya.

Perlu diketahui, menurut informasi yang didapat oleh awak media saat berkunjung untuk berziarah, bahwa mayoritas penduduk kelurahan Ngargosari adalah berpenghasilan sebagai pekerja atau buruh pabrik. Artinya sistem ekonomi yang sudah ditentukan melalui gaji tetap, dan/atau berpeluang stagnan kualitas serta kuantitas taraf hidup keluarga.

Kabar gembira, dan mudah-mudahan bukan hanya isu angin surga yang dihebohkan oleh mereka para penyelenggara pemerintah yang berkompeten dalam hal ini, yaitu program yang mempermudah bagi pengunjung atau peziarah pada destinasi wisata religi Ibunda Nyai Dewi Sekardadu.

Sesuai penjelasan Sutisno selaku Lurah Ngargosari, bahwa telah dilakukan mu-

syarah intensif bersama jajaran pemerintahan, dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga para anggota legislatif daerah kabupaten Gresik.

"Topik musyawarah ialah integrasi tempat-tempat wisata yang berada dalam wilayah kota Gresik, bahwa akan difasilitasi oleh pemerintah daerah bagi para pengunjung atau peziarah dengan kendaraan khusus, guna mengangkut serta mengantarkan wisatawan ke beberapa tempat tujuan destinasi," kata Lurah mengungkapkan.

Program pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengintegrasikan tempat-tempat wisata dalam wilayah kota Gresik, ucap Sutisno. Lanjutnya, terdapat lebih dari 5 destinasi, diantaranya adalah pesarean atau makam Ibunda Nyai Dewi Sekardadu, ulas Lurah Ngargosari.

Jika mempertimbangkan dana dan besarnya anggaran, dalam penganggaran Sutisno, maka bisa jadi program tersebut hanya sekedar menjadi wacana," tuturnya.

"Akan hal ini, segala bentuk dukungan dan doa dari segenap peng istikomah, baik pengunjung dan/atau peziarah pesarean atau makam Ibunda Nyai Dewi Sekardadu, agar program integrasi tempat wisata oleh pemerintah daerah kabupaten Gresik, dapat terlaksana, Aamiin ya Rabbal Alaamiin, pungkasnya. (Subhan Arif)

"Setiap pegawai diharuskan memiliki 20 rekening kelolaan nasabah Simarmas, dan kami memiliki sekitar 200 pegawai. Dengan begitu, diharapkan adanya kedekatan secara emosional antara pengelola dengan nasabah dan masyarakat, sehingga bisa memberikan pelayanan prima serta mengoptimalkan program/produk dan layanan jasa keuangan," tegasnya.

Selain Simarmas Brio, lanjutnya, Bank Daerah Kabupaten Madiun juga memiliki program Simarmas motor, dengan saldo minimal Rp 2 juta. Jangka waktu 12 bulan, kini memasuki bulan keenam. Hadiah diundi secara periode empat bulan sekali berupa 1 unit motor listrik, Honda Beat dan scoopy, serta hadiah hiburan yang diundi tiap bulan berupa perangkat elektronik.

Pemenang undian hadiah utama berupa 1 unit Mobil Brio yang penarikannya dilaksanakan pada 19 Oktober 2025 lalu jatuh pada Winarni nasabah asal Desa Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Yang sudah menjadi nasabah sekitar 15 tahun. Ia mengaku merasa senang dengan mendapat hadiah utama ini. "Alhamdulillah, saya merasa sangat gembira serta bersyukur mendapat hadiah Mobil Brio ini, bisa menjadi kendaraan keluarga dan terima kasih pada Bank Madiun, semoga semakin berkembang, bisa memberi pelayanan prima dan bermanfaat bagi pemilik, pengelola serta Masyarakat," ujar Winarni. (Bas)

Rajin dan konsistensi menabung merupakan kunci utama, lanjut Velly, karena peserta harus konsisten menabung dari awal sampai akhir program. Kalau berhenti di tengah jalan, otomatis gagal. "Program ini kami canangkan mulai April 2023 selama 30 bulan, jadi sampai Oktober 2025 ini. Nasabah wajib menabung cukup dengan 100 ribu per-bulan secara rutin dan tertib. Ketentuan lain pada saat pengundian saldo minimal harus 3 juta, jadi rajin dan konsistensi menabung sangat diperlukan," jelasnya.

La menambahkan, untuk optimalisasi dan sukses program secara berkelanjutan seluruh pegawai Bank Daerah Kabupaten Madiun turut menjadi motor penggerak.

SD Negri Sumber Kerep, Sekolah Asri Krisis Air Bersih



Nampak Wali Murid, SD Negri Sumberkerep

LAMONGAN, BN - Rindang nan asri penuh dengan berbagai macam tanaman hias, pohon-pohon hijau mengelilingi seluruh penjuru dalam area lapangan sekolah, serasa menggenapi keelokan sekolah, ialah Sekolah Dasar (SD) Negri Sumber Kerep, Mantup daerah kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Strategis, letak gedung sekolah berketepatan berada disepanjang ruas jalan raya poros provinsi Jawa Timur. Rute jalan raya menghubungkan tiga wilayah kabupaten/kota yakni

kabupaten Lamongan melintasi kabupaten Gresik hingga ke arah Kota Surabaya.

Kesan tenang telah melekat, kental terasa sangat suasana teduh dan damai dalam ruang lingkup lingkungan SD Negri Sumber Kerep Mantup. Bersama perfome figur dari seorang Kepala Sekolah (Kasek) sebut saja namanya Ibu Nugrahani Wuri Yandani S.Pd.

Sekelumit ungkapan menjadi kesimpulan journal, hasil dari beberapa kali kunjungan kerja awak media Cetak & Online Bidik Nasional. Akhir bulan Oktober 2025, disambut ramah oleh ibu Kasek, mimik supel senantiasa terlintas bagi siapa saja yang baru melihatnya.

Program prioritas sekolah beserta inovatif personal dari Kasek sebagai figur dan orang utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan di SD Negri Sumber Kerep, Mantup, Lamongan.

Ialah tema dari kesempatan untuk yang keseharian bertemu, dikemas dalam sesi wawancara ringan, namun berharap dapat menjadi bekas atau kesan sebagai nilai tukar manfaat antar sesama peran.

Mengingat riwayat kemitraan dengan awak media terbilang cukup lama, yaitu telah berganti 3 kali Kepala Sekolah. yMenggali potensi figur individu beserta kepedulian pribadinya (Human Personality) bagi seluruh karyawan sekolah atau bagi para tenaga pendidik khususnya, adalah motif dari pada awak media dalam menjalankan peran pada kesempatan melakukan wawancara.

Bagi penulis, adalah bentuk tanggung jawab peran yakni saling mengisi dan melengkapi terlebih jika masih besar celah-celah kekurangan atau kelemahan, mengingat hubungan kemitraan.

Saling mengingatkan menjadi tajuk supervisi personal awak media, baik terhadap sejawat terlebih bagi para mitra kerja pers media. Upaya mengasah serta pengembangan kreativitas personal dan/atau secara kelembagaan melalui dialog-dialog persuasif ialah strateginya.

Tiap hari menempuh perjalanan hingga berpuluhan-puluhan kilometer, Ibu Nugrahani Wuri Yandani S.Pd, tak lelah oleh waktu dan tak lelah oleh tugas pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang harus siap menerima serta menjalankan tugas jika dimanapun ditempatkan, adalah cermin gambaran kepribadian yang memancarkan dedikasi.

Bu Wuri, begitu panggilan akrabnya, menggaris bawahi dan sebagai point dari seluruh isi percakapan ialah kendala tentang pengadaan air bersih, tuturnya. yBahkan jika ditimbang dalam kebutuhannya menjadi sangatlah penting, mengingat air bersih adalah salah satu dari sumber kehidupan. Skala prioritas kinerja serta perhatian khusus bagi seluruh pihak terlebih yang berkompot, dalam merealisasikan pengadaannya.

Pengairan dari desa, untuk sementara ini atau yang selama ini memenuhi kebutuhan air bersih untuk lembaga sekolah SD Negri Sumberkerep, ucapan Kasek. Apalagi masih kerap kali tidak lancar dalam pemenuhannya, ungkapnya.

Juga menambahkan, bila kebutuhan air bersih dapat segera terpenuhi, maka konsentrasi program kerja Ibu Nugrahani Wuri Yandani S.Pd, selaku Kasek SD Negri Sumberkerep Mantup Lamongan, ialah renovasi gedung serta halaman sekolah, mengingat yang selama ini masih belum tersentuh, harapnya.

Hingga artikel ini ditayangkan, melalui kapasitas masing-masing peran, berharap besar bila kiranya dengan melibatkan seluruh pihak serta komponen yang ada, baik internal atau eksternal penyelenggaraan pendidikan SD Negri Sumberkerep, Mantup Lamongan, guna turut berupaya atau mendorong segera terpenuhinya pengadaan air bersih.

Bukan berarti pesimistik, jika pengadaan air bersih belum juga segera terpenuhi, maka tidak pula kala pentingnya, yaitu kebutuhan sarana dan prasarana yang juga luput perhatian pihak yang berkompot, seperti renovasi gedung dan kelengkapan fasilitas lapangan sekolah, mengingat tidak hanya tenggang waktu untuk mendapatkan perhatian namun kualitas yang mensyaratkan agar segera direspon ataupun ditanggapi, tekan Kasek berimbau. (Subhan Arif)

Trabas Kamtibmas Polres Nganjuk Bersama Komunitas Trail Gelar Silaturachmi dan Bagi-bagi Bansos



Trabas Kamtibmas Polres Nganjuk Bersama Komunitas Trail saat bagi-bagi Bansos. (ag)

NGANJUK, BN - Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso, S.H, S.I.K, M.M, memimpin kegiatan Trabas Kamtibmas bersama komunitas trail Nganjuk yang dilanjutkan dengan silaturahmi serta pemberian

bantuan sosial di Balai Desa Gemengeng, Kecamatan Bagor, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang sinergi Polres Nganjuk bersama komunitas trail dan masyarakat dalam mempererat kebersamaan, memperluas jangkauan komunikasi, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya peran bersama dalam menjaga keamanan wilayah pedesaan.

Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso menjelaskan bahwa Trabas Kamtibmas bukan sekadar ajang menyalurkan hobi, melainkan sarana memperkuat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat.

"Lewat kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa menjaga keamanan tidak harus selalu dalam suasana formal. Melalui kebersamaan, pesan-pesan Kamtibmas bisa tersampaikan dengan ringan namun tetap mengena," ujarnya.

Usai kegiatan trabas, acara dilanjutkan dengan silaturahmi Kamtibmas di Balai Desa Gemengeng yang dihadiri Camat Bagor Suwarno, S.E., M.M., kepala desa se-Kecamatan Bagor, tokoh masyarakat, serta warga penerima bantuan sosial. Dalam kegiatan tersebut, Polres Nganjuk menyalurkan puluhan paket sembako dan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia.

Kapolres juga menambahkan bahwa Polres Nganjuk menyediakan layanan pengaduan masyarakat melalui WhatsApp Lapor Kapolres di nomor 0811-5111-0110 serta Call Center 110 yang aktif selama 24 jam. "Kami juga mengajak agar kegiatan siskamling kembali diaktifkan untuk menjaga situasi aman dan kondusif di desa," tambahnya.

Kapolres Nganjuk menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus digiatkan di berbagai wilayah sebagai bentuk cipta kondisi menuju akhir tahun, agar Kabupaten Nganjuk tetap aman, damai, dan kondusif.

Camat Bagor Suwarno, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polres Nganjuk dalam menggabungkan kegiatan olahraga dan sosial kemasyarakatan.

"Kegiatan ini menjadi contoh sinergi positif antara Polri dan masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan warga," ujarnya. (Ag)

Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Serahkan Hadiah Utama Program "Simarmas Brio" 2025



Penyerahan hadiah utama Program "Simarmas Brio" 2025. (ist)

MADIUN, BN - Penyerahan hadiah utama dari program Simarmas Brio yang merupakan salah satu program andalan dari Perumda Bank Daerah Kabupaten Madiun digelar pada Jumat (21/11/2025), bertempat di halaman kantor Bank tersebut.

"Acara penarikan undian Hadiah Utama program Simarmas Brio ini sebenarnya sudah dilaksanakan pada Minggu sore tanggal 19 Oktober 2025, di halaman Gedung Kampung Pesilat Kabupaten Madiun dan hari ini baru penyerahan pada pemenang karena menunggu momen yang tepat dan kesiapan Bapak Bupati", kata Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Velly Murdianto, dalam sambutannya.

Rajin dan konsistensi menabung merupakan kunci utama, lanjut Velly, karena peserta harus konsisten menabung dari awal sampai akhir program. Kalau berhenti di tengah jalan, otomatis gagal. "Program ini kami canangkan mulai April 2023 selama 30 bulan, jadi sampai Oktober 2025 ini. Nasabah wajib menabung cukup dengan 100 ribu per-bulan secara rutin dan tertib. Ketentuan lain pada saat pengundian saldo minimal harus 3 juta, jadi rajin dan konsistensi menabung sangat diperlukan," jelasnya.

Pembinaan Izin Usaha Perikanan Tangkap Digelar di Kabupaten Gresik

GRESIK, BN - Upaya serius dalam mewujudkan tertib administrasi dan legalitas usaha perikanan tangkap di Kabupaten Gresik terus dilakukan. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Para peserta yang merupakan nelayan aktif di perairan Gresik menerima materi mendalam tentang dua aspek krusial yaitu Prosedur Penerbitan Pas Kecil untuk kapal penangkap ikan, mencakup persyaratan administratif dan teknis, dan Mekanisme Perizinan Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya untuk kapal berukuran hingga 30 GT.

Kegiatan yang digelar 23 Oktober 2025 menghadirkan narasumber kunci dari Kantor Kesahab-

daran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik dan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Para peserta yang merupakan nelayan aktif di perairan Gresik menerima materi mendalam tentang dua aspek krusial yaitu Prosedur Penerbitan Pas Kecil untuk kapal penangkap ikan, mencakup persyaratan administratif dan teknis, dan Mekanisme Perizinan Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya untuk kapal ber-



Kegiatan Pembinaan Izin Usaha Perikanan Tangkap di Desa Pangkahwetan, Gresik yang digelar Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban. (dkp)

Pembinaan ini bertujuan agar nelayan dapat menjalani proses perizinan dengan lebih mudah dan teratur.

Sebagai puncak acara

dan wujud dukungan nyata, dilakukan penyerahan secara simbolis dokumen Buku Kapal Perikanan yang telah berhasil terbit kepada nelayan yang telah mem-

ruhi seluruh persyaratan. Dengan legalitas kapal yang sah, nelayan tidak hanya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga mem-

buka akses penting terhadap berbagai program bantuan, subsidi, dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Diharapkan, kegiatan ini menjadi dorongan signifikan

bagi seluruh nelayan di Gresik untuk segera mendapatkan kelengkapan dokumen perizinan usaha mereka.

(dkp/adv)

Puluhan Fatayat NU Kecamatan Talun Blitar Ikut Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue



Para anggota Fatayat NU Kecamatan Talun saat mengikuti Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue yang digelar UPT BLK Kediri bekerjasama LPK Karunia Kabupaten Blitar (pri)



BLITAR, BN - UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kediri bekerjasama LPK Karunia Kabupaten Blitar diikuti 16 peserta dari anggota Fatayat NU Kecamatan Talun melaksanakan pelatihan pembuatan roti dan kue ke-8 bertempat di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar,

Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).

Sebanyak 16 peserta dari Fatayat NU setempat yang ikut pelatihan membuat roti dan kue ini masuk Angkatan VI tahun 2025 dimulai tanggal 30 Oktober sampai 19 Nopember 2025.

Laily Umatul Khoiroh selaku Instruktur Pelatihan

Pembuatan Roti dan Kue mengatakan untuk pelatihan sudah memasuki hari ke 13.

"Peserta sudah diajarkan beberapa materi cara membuat roti kering, kue basah dan cake. Selama 13 hari pelatihan sudah diberikan sebanyak 28 resep," ucap Laily.

Ia juga menuturkan peserta terlihat antusiasnya ikut pelatihan sangat tinggi dan semangatnya luar biasa. Untuk pelatihan satu hari yang seharusnya resep yang harus dipraktekkan, tapi ini di luar dugaan dalam satu hari bisa sampai tiga resep. "Sebelumnya, LPK Karunia sudah kerjasama dengan

BLK Kediri mulai tahun 2018 berarti kurang lebih 7 tahun. Peserta yang berasal dari anggota Fatayat NU dari Kecamatan Talun, dari masing-masing desa mengirimkan perwakilan dua orang," ujar Laily.

Ia juga menuturkan peserta terlihat antusiasnya ikut pelatihan sangat tinggi dan semangatnya luar biasa. Untuk pelatihan satu hari yang seharusnya resep yang harus dipraktekkan, tapi ini di luar dugaan dalam satu hari bisa sampai tiga resep.

"Peserta yang ikut pelatihan tanpa dipungut biaya alias gratis. Peserta yang lulus akan menerima sertifikat dari BLK Kediri. Selanjutnya, pelaksanaan uji kompetensi ditentukan waktu-waktu dari LSP, jika peserta

dinyatakan lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat dari BNSP," ujarnya.

Laily berharap setelah peserta mendapatkan pelatihan pembuatan roti dan kue dari sini. "Mereka bisa memanfaatkan ilmunya dan puluhan resep yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa membuat kue serta menambah penghasilan buat keluarga," harapnya.

Salah satu peserta bernama Jihan Asna (43) asal Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar mengatakan yang mendorong ikut pelatihan pembuatan roti dan kue untuk mengembangkan diri.

"Dikarenakan, membuat roti dan kue merupakan hobbi. Saya ingin hobbi yang dimiliki tersalurkan untuk bisa menambah penghasilan keluarga," ucap Jihan.

ia selama mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue ini betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh menambah ketekunan membuat roti dan kue. Selama pelatihan sudah 13 hari mendapatkan 28 resep seperti sus, selai, donat, roti kukus dan roti kacang

"Kedepannya saya berharap dengan ketrampilan yang saya dapatkan dari BLK Kediri ini untuk jualan kue secara mandiri bisa meningkatkan perekonomian keluarga," harapnya.

(adv/pri)

Cetak Wirausaha Baru BLK Kediri Gelar Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue di Desa Sumberjo Blitar

BLITAR, BN - UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kediri melaksanakan pelatihan pembuatan roti dan kue ke-7, bertempat di area Masjid Baitusomad Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).

Sebanyak 16 peserta dari Fatayat NU Desa Sumberjo yang ikut pelatihan membuat roti dan kue ini masuk Angkatan VI tahun 2025 dimulai tanggal 28 Oktober sampai 18 Nopember 2025.

Slamet Wiyono selaku Instruktur Kejuruan Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue menyampaikan pelatihan yang dilaksanakan di Desa Sumberjo Kecamatan

Sanankulon Kabupaten Blitar diikuti 16 peserta warga setempat selama 18 hari.

Pelatihan kali ini untuk materi yang diberikan ada pembuatan kue, roti kering dan jajan pasar. Selama pelatihan akan diberikan sebanyak 25 resep dipraktekkan selama 18 hari pelatihan kelebihannya.

Slamet Wiyono menjelaskan selama mengikuti pelatihan mendapatkan fasilitas gratis mulai dari bahan-bahan membuat roti, seragam, makan gratis dan pada akhir pelatihan akan mendapatkan uang transportasi.

"Peserta yang ikut pelatihan tanpa dipungut biaya alias gratis. Peserta yang lulus akan menerima sertifikat dari BLK Kediri. Selanjutnya,

pelaksanaan uji kompetensi ditentukan waktu-waktu dari LSP, jika peserta

Sanankulon Kabupaten Blitar mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang dilaksanakan BLK Kediri kerjasama dengan organisasi Fatayat NU Desa Sumberjo.

Kegiatan ini sebagai pemberdayaan masyarakat dan wadah bagi kaum perempuan yang membutuhkan ketrampilan pembuatan roti dan kue. Materi yang didapatkan kue basah dan Bakrie.

"Alhamdulillah kegiatan berdampak sekali dan membawa manfaat dengan ketrampilan ini. Dan, menariknya pada hari Jumat kita pelatihan dekat dengan Masjid,

dimana hasil dari pelatihan membuat kue, hasilnya disa-

lurkan ke jamaah masjid dan direspon sangat baik," ucapnya.

Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada BLK Kediri beserta jajarannya serta Chef Slamet yang selama ini sudah memberikan ilmu dan keterampilan baru yang sebelumnya tidak pernah dapatkan.

"Kami berharap peserta yang sudah ikut pelatihan bisa mengembangkan ketrampilan yang akan di-support pihak desa yang akan ada bazar UMKM yang diadakan momen Hari Ibu, untuk menampilkan hasil pelatihan membuat roti dan kue," ujarnya.

Ia menambahkan, menariknya pelatihan membuat roti dan kue tidak hanya

perempuan, tapi juga diikuti dua peserta laki-laki, yakni Faiz dan Eko.

Mereka punya keyakinan bahwa menimba ilmu bisa dimanfaatkan untuk menambah keterampilan dalam membuat roti dan kue. "Harapannya dengan ketrampilan yang sudah diperoleh untuk

bisa melebarkan sayap se-cara kemandirian. Sebagai perempuan kita bisa berdaya untuk keluarga bisa memberikan hasil dari ketrampilan yang sudah diperoleh untuk menunjang perekonomian yang lebih baik lagi," harap Hendrik Setiowati. (adv/pri)

UPT BLK Kediri Menggelar Pelatihan Roti dan Kue di Desa Maron Srengat Kab. Blitar



Kegiatan Pelatihan kejuruan pembuatan roti dan kue yang digelar UPT BLK Kediri di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. (Foto: Pri)

BLITAR, BN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kediri melaksanakan pelatihan kejuruan pembuatan roti dan kue bertempat di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Rabu (12/11/2025).

Sebanyak 16 peserta dari warga desa setempat yang ikut pelatihan membuat roti dan kue yang ke-6 ini masuk Angkatan VI tahun 2025 dimulai tanggal 30 Oktober sampai 19 November 2025.

Nurul Komariyah selaku Instruktur kejuruan pelatihan membuat roti dan kue. Ia mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan

keterampilan warga setempat dalam bidang kuliner, khususnya dalam pembuatan produk roti dan kue.

"Materi yang diberikan ke peserta mulai pemilihan bahan, penimbangan bahan, mencampur bahan, membagi, membentuk dan mengoven. Peserta diberikan sebanyak 30 lebih resep yang diajarkan," ucapnya.

Ia juga menambahkan selama mengikuti pelatihan mendapatkan fasilitas gratis mulai dari bahan-bahan

membuat roti, seragam, makan gratis dan pada akhir pelatihan akan mendapatkan uang transportasi.

"Peserta yang ikut pelatihan tanpa dipungut biaya alias gratis. Peserta yang lulus akan menerima sertifikat dari BLK Kediri. Selanjutnya,

pelaksanaan uji kompetensi ditentukan waktu-waktu dari LSP, jika peserta

berharap semoga pelatihan ini bisa menjadi bekal bagi para peserta untuk membuka lapangan usaha sendiri atau meningkatkan usaha mandiri untuk meningkatkan ekonomi buat keluarga," ujarnya.

Salah satu peserta Nadila A'malia Umul Fadila (23) asal Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar mengatakan yang mendorong ikut pelatihan ini ingin menambah wawasan dan pengalaman mengenai pembuatan roti dan kue.

"Juga untuk mengembangkan ide berjualan, karena sekarang ini banyak pesaing munculnya UMKM. Hal ini menjadi tantangan buat saya sendiri kedepannya," ucap Nadila.

Ia menjelaskan untuk pelatihan sudah berjalan dua minggu lebih sudah dapat 30 resep roti dan kue. Seperti, membuat roti manis, roshroll, roll cake, bolu pisang, kue sus Fla, molen, risol, pastel, kue lumpur, muffin, roti kukus dan lidah kucing.

"Setelah dapat pelatihan ini harapan kedepan bisa membuka bakery sendiri melalui platform online juga agar masyarakat bisa mengenal produk yang dijual nanti," ungkap Nadila.

(adv/pri)



Pertama Dalam Sejarah, HUT Muara Enim Ke-79 Digelar Secara Serentak

□ Bersama Mewujudkan Kabupaten Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA)

MUARA ENIM, BN - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Muara Enim ke-79 digelar secara serentak di seluruh kecamatan, dipimpin langsung oleh Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., di Lapangan Merdeka Muara Enim, Selasa (18/11).

PERINGATAN yang mengusung semangat "Bersama Mewujudkan Kabupaten Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA) Maju dan Berkembang Jutan" ini turut dihadiri Wakil Bupati, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., beserta jajaran Forkopimda lainnya, mencerminkan tekad kebersamaan dan gotong-royong untuk membangun Kabupaten Muara Enim lebih maju dan berdaya saing kedepan.

Dalam amanatnya, Bu-



Berbagai momen kegiatan peringatan HUT Kabupaten Muara Enim Ke - 79 digelar secara serentak seluruh kecamatan. Acara dipimpin langsung oleh Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., di Lapangan Merdeka Muara Enim, Selasa (18/11). Tampak bupati Muara Enim dan jajaran Forkopimda mengikuti acara dengan senang gembira dan penuh khidmat. (ist)

Muara Enim yang MEMBARA. Tak cuma itu, dirinya pun mengajak semua pihak bersatu dan bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di Bumi Serasan Sekundang.

peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61, Hari Kesetiaan Kawanwan Sosial Nasional ke-67, Hari Guru Nasional ke-32, dan Hari Korpri ke-54 tingkat Kabupaten Muara Enim.

Bupati mengharapkan perpaduan momen ini menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam membangun Kabupaten Muara Enim. Diakhir acara, Bupati bersama Wabup

menyerahkan sejumlah penghargaan kepada masyarakat beserta OPD yang meraih prestasi setahun terakhir. Kemudian dilanjutkan tabligh akbar sebagai penutup rangkaian kegiatan, sekaligus sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

(Adv/Adi)

pati mengatakan HUT Kabupaten Muara Enim ke-79 diharapkan menjadi momen reflektif bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Peringatan ini juga menjadi sarana introspeksi dan evaluasi terhadap capaian pembangunan, pelayanan publik, serta sinergi antar lembaga dan komunitas. De-

ngan semangat kebersamaan, diharapkan lahir gagasan-

gagasan baru yang lebih progresif demi mewujudkan lainnya berlangsung istimewa, karena dirangkaikan dengan



Kejari Way Kanan Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum



Kegiatan pemusnahan perkara barang bukti Tindak Pidana Umum yang digelar Kejari Way Kanan. (Arye)

WAY KANAN, BN - Kejaksaan Negeri Way Kanan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), bertempat di halaman kantor Kejari, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pengadilan Negeri Way Kanan, Polres Way Kanan, Lapas Kelas II B Way Kanan, Dinas Kesehatan, BNN Kabupaten Way Kanan, MUI, serta organisasi kemasyarakatan seperti GRANAT dan YANNG.

Dalam laporannya, Kasi Barang Bukti Kejari Way Kanan Refki Leksono, S.H. menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan tindak pidana yang tingkatnya cukup tinggi, ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan Mahmudin, S.H., M.H. dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini

lanjut dari seluruh perkara yang telah diputus pengadilan dan tidak memiliki upaya hukum lanjutan. Ia mengungkapkan bahwa perkara narkotika masih mendominasi tindak pidana di Way Kanan.

Jumlah perkara yang kami musnahkan sebanyak 20 perkara, dan 9 di antaranya merupakan perkara narkotika. Ini menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Way Kanan masih cukup tinggi," pesan Kejari.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti secara simbolis bersama para tamu undangan. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, dipotong, atau dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. (Arye)

Asahan Perkuat Komitmen Restorative Justice, Bupati Hadiri Penandatanganan MoU/PKS di Medan

ASAHAH, BN - Provinsi Sumatera Utara resmi menjadi provinsi ketiga di Indonesia yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi pelaku tindak pidana. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi restorative justice (RJ) di tingkat daerah, setelah sebelumnya diterapkan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penandatanganan

PKS berlangsung di Aula Raja Inal Siregar dan dihadiri seluruh bupati/wali kota se-Sumut, termasuk Kabupaten Asahan.

Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Undang Mugopal, menjelaskan bahwa pidana kerja sosial diterapkan berdasarkan putusan pengadilan, dengan pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Penerapannya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun, ketika hakim menatihkan pidana penjara maksimal enam bulan atau denda kategori II. Ia menegaskan bahwa pidana kerja sosial wajib dilakukan delapan jam per hari dan tidak boleh dikomersialkan, sesuai ketentuan KUHP 2023. Saat ini terdapat sekitar 300 jenis kerja sosial yang dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku

Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan skema kerja sosial secara terpadu dan membuka peluang pemberian insentif kepada peserta sesuai mekanisme yang berlaku. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar turut menegaskan bahwa RJ mengedepankan pemulihan hubungan, pertanggungjawaban pelaku, dan perdamaian tanpa proses pengadilan yang panjang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asahan menyampaikan komitmen penuh untuk menjalankan PKS secara optimal di daerah. "Penerapan pidana kerja sosial merupakan langkah penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung implementasi PKS ini di lapangan," ujarnya. (T.P)

Penguatan Koperasi Merah Putih, Pemkab Asahan Tingkatkan Pemahaman dan Kapasitas SDM Koperasi

ASAHAH, BN - Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Tahun 2025 diselenggarakan di Aula Hotel Antariksa Kisaran sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Asahan. Peserta kegiatan terdiri dari pengurus koperasi, perangkat kecamatan, serta pemangku kepentingan terkait yang fokus memperbaiki tata kelola dan manajemen koperasi agar mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara lebih efektif.

Melalui laporan penyelenggara, peserta mendapatkan penjelasan mendetail mengenai kriteria lahan dan bangunan yang diperlukan dalam mendukung operasional koperasi, sesuai Surat Edaran Menteri Koperasi RI Nomor 4 Tahun 2025. Ketentuan tersebut meliputi kebutuhan lokasi strategis,

luas minimal 1.000 meter persegi, serta pemanfaatan aset pemerintah sebagai basis pendirian gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung koperasi. Sejumlah koperasi yang telah aktif di Asahan turut dipresentasikan sebagai contoh implementasi program yang sudah berjalan.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme kerja koperasi, mulai dari penguatan kelembagaan, pelayanan anggota, hingga strategi pengembangan unit usaha. Melalui peningkatan kapasitas ini, KDKMP diharapkan dapat menjadi wadah ekonomi yang inklusif, membantu masyarakat yang belum memiliki modal, serta memperkuat peran desa dan kelurahan dalam memajukan ekonomi wilayahnya. Pendekatan ini sekaligus mendorong lahirnya koperasi yang lebih mandiri, transparan, dan profesional. (T.P)

seltibcarlantas periode Januari – Oktober

2025 yang menunjukkan penurunan 39% pelanggaran lalu lintas, dari 120.572 kasus pada tahun 2024 menjadi 73.335 kasus pada tahun 2025. Selain itu, kasus kecelakaan lalu lintas juga turun sebesar 3,5% menjadi 5.475 kejadian pada periode yang sama.

Meski angka tersebut menunjukkan perbaikan, Kapolda menegaskan bahwa potensi kerawanan lalu lintas di Sumatera Utara masih tinggi dan memerlukan langkah strategis berkelanjutan. Operasi Zebra Toba 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 17

hingga 30 November 2025, dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif, hingga penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai SOP. Upaya ini diharapkan memperkuat sinergi antara koperasi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman dan tertib. (T.P)

Operasi Zebra Toba 2025 Dimulai, Kapolda Sumut Soroti Kerawanan Lalu Lintas

ASAHAH, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan Zebra Toba 2025 yang berlangsung di Halaman Kantor Polres Asahan. Apel ini dipimpin oleh Wakapolres Asahan, Kompol Selamet Riyadi, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, perwakilan Kejaksaan Negeri, Dandim 0208/Asahan, Danlanal Tanjung Balai-Asahan, dan perwakilan Pengadilan Negeri. Kegiatan berlangsung khidmat dan menjadi penanda dimulainya upaya terpadu dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas di wilayah Asahan.

Dalam amanatnya, Wakapolres membacakan pidato Kapolda Sumut yang mengawali dengan Salam Presisi dan mengapresiasi seluruh panitia, personel, dan pihak pendukung yang telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga apel dan persiapan operasi dapat berjalan aman dan tertib. Kapolda turut memaparkan data Kam-



Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan Zebra Toba 2025 di Halaman Kantor Polres Asahan. (tp)

Empat Desa di Simpang Renggiang Tetapkan Lokasi Gerai Koperasi Desa Merah Putih



Camat Simpang Renggiang Adi Yusman bersama Muspika saat melihat Lokasi Gerai Koperasi Desa Merah Putih. (Diskominfobeltim)

BELTIM, BN - Percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memasuki tahap yang lebih serius. Empat desa resmi menetapkan lokasi untuk pembangunan gerai fisik koperasi yakni Desa Lintang, Desa Aik Madu, Desa Renggiang, dan Desa Simpang Tiga.

Penetapan ini merupakan langkah nyata menjalankan amanat Keputusan Bersama empat menteri dan dua lembaga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur koperasi.

Camat Simpang Renggiang Adi Yusman mengatakan proses pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan matang dengan mengutamakan aspek aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Lahan yang ditetapkan merupakan aset milik pemerintah desa sehingga memenuhi salah satu poin kunci dalam regulasi terbaru yang mendorong pemanfaatan aset desa.

"Penetapan lokasi ini merupakan hasil kolaborasi sinergis antara Pemerintah Kecamatan Simpang Renggiang, Pemerintah Desa setempat, pihak TNI, dan Tenaga Ahli Pendamping Koperasi," kata Camat Adi Yusman.

Ia bersyukur bahwa empat desa di wilayahnya telah menuntaskan tahap penetapan lahan dan berharap lokasi-lokasi yang telah ditetapkan ini segera dinilai layak oleh pihak terkait, termasuk PT Agrinas Pangandaran Nusantara sebagai pelaksana pembangunan, sehingga proses fisik dapat segera dimulai.

Kehadiran Gerai KDKMP, ungkap Adi, diharapkan dapat menjadi pusat layanan ekonomi bagi masyarakat. Gerai ini akan berfungsi sebagai unit usaha yang melayani penjualan sembako dengan harga terjangkau, distribusi pupuk bagi petani, serta menjadi etalase untuk memasarkan produk-produk unggulan lokal, baik hasil pertanian maupun kerajinan tangan warga.

Selain itu, pembangunan gerai tersebut diharapkan dapat segera mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan di Kecamatan Simpang Renggiang.

"Gerai ini bukan hanya soal bangunan. Ini adalah manifestasi dari Asta Cita kedua dan keenam Presiden yakni swasembada pangan dan pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi. Setiap gerai yang dibangun adalah gerai yang hidup, berfungsi, dan memberdayakan," ungkapnya.

Perlu diketahui, di Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP yang berlokasi di Dusun Simpang 3 RT 1 Desa Simpang Tiga atau tepatnya di belakang tugu perjuangan dengan luas lahan mencapai 35 x 50 meter.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerkop UKM) Kabupaten Beltim Gustaf Pilandra menyampaikan bahwa sebanyak 26 titik lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Beltim sudah siap diverifikasi. Verifikasi lahan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat oleh PT Agrinas Palma Nusantara bekerja sama dengan Kodim 0414/Beltim.

"Saat ini koperasi tersebut di setiap desa di Beltim telah berbadan hukum dan ditariketkan diharapkan bisa berjalan pada Maret 2026," kata Gustaf. (diskominfobeltim/as)

Momentum Milad Muhammadiyah Ke-113, Tapak Suci Kukuhkan Bupati Asahan sebagai Pendekar Madya



ASAHAH, BN - Peringatan Milad Muhammadiyah Ke-113 dengan tema "Memajukan Kesejahteraan Bangsa" menjadi momentum istimewa bagi Kabupaten Asahan ketika Tapak Suci Putra Muhammadiyah mengukuhkan Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., sebagai Pendekar Madya Kehormatan.

Gelar ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas komitmen beliau dalam memperkuat nilai keberianan moral, pembelaan terhadap kebenaran, dan penguatan karakter masyarakat. Proses pengukuhan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Asahan dan

dihadiri oleh Pimpinan Wilayah VIII Dewan Pendekar Tapak Suci Sumatera Utara, Ketua PD Muhammadiyah Asahan beserta jajaran pengurus, OPD terkait, serta para tokoh dan tamu undangan lainnya, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menuju Muktamar Muhammadiyah Ke-49 di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Drs. H. M. Afan Hadikusumo, menjelaskan bahwa penghormatan ini merupakan apresiasi nasional kepada figur yang dinilai selaras dengan nilai-nilai Tapak Suci – keberianan, akhlak, keteguhan moral, dan komitmen pada kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa Tapak Suci adalah perguruan seni bela diri berbasis Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat inklusif, menerima siapa pun tanpa memandang latar belakang agama. Prinsip inklusivitas dan nilai persaudaraan ini menjadi fondasi utama peringatan Milad Muhammadiyah tahun ini.

Bupati Asahan dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Tapak Suci dan Muhammadiyah atas kehormatan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa gelar Pendekar Madya merupakan amanah yang akan dijaga dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi pengingat untuk terus berpegang pada nilai keberianan moral dan membela kebenaran. Bupati juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi Tapak Suci dan Muhammadiyah dalam membina karakter generasi muda serta memperkuat nilai-nilai keumatan di Kabupaten Asahan. (T.P)

KEHILANGAN STNK

Telah Hilang STNK kendaraan MITSUBISHI COLT DIESEL NOPOL BE - 9874 - WD, NOKA MHMFE74P5GK160519, NOSIN 4D34T - P69644, Atas Nama RASMAN SITEPU. Bagi yang Menemukan Mohon Hubungi Bpk Arye, Hp: 085379714000

Bupati Lampung Barat Sayangkan Banyaknya Kepala Sekolah Tersandung Penipuan Revitalisasi

LAMPUNG BARAT, BN - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus menyayangkan atas adanya isu permasalahan penipuan revitalisasi yang terjadi terhadap 46 kepala sekolah diwilayahnya. Atas kekecewaan itu ia memerintahkan Inspektorat yang merupakan instansi pengawas internal penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk segera melakukan pemeriksaan guna mengklarifikasi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Seperi diketahui, maraknya isu 46 kepala sekolah TK dan SD di Lampung Barat menjadi korban penipuan berkedok program revitalisasi oleh salah satu oknum yang mengaku dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Parosil Mabsus, semestinya hal ini tidak terjadi jika kepala sekolah dalam mengajukan program revitalisasi dapat mematuhi aturan pedoman dan ketentuan terkait bantuan revitalisasi.

Berdasarkan hasil rakor seluruh kepala daerah se-Indonesia dengan Kemendikdasmen dan DPR RI Komisi 10 Minggu kemarin, bahwa alur untuk mendapatkan revita-



Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus. (ist)

lisasi adalah pengolahan data sasaran revitalisasi berdasarkan data cut-off 31 Oktober 2025, penentuan prioritas awal sasaran revitalisasi oleh Pemerintah Daerah 13-30 November 2025, pemilihan calon penerima revitalisasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14-01 Desember 2025, kemudian pengecekan data yang disusulkan Pemerintah Daerah oleh pusat 21 November 2025 - 20 Desember 2025," jelas Parosil Mabsus.

"Tidak ada program pemerintah pusat untuk bantuan revitalisasi pendidikan tidak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena data di input dari Da-

podik yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/kota," sambungnya.

"Artinya jika kita lihat dari prosedur dan linimasa pengajuan program bantuan revitalisasi 2026 memang ada yang janggal, sangat disayangkan jika masih ada kepala sekolah yang tergiur dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan dan prosedur," tambahnya.

(RILIS/TAUFIK)

Wujud Apreasiasi Pemkab Lambar, Bupati Parosil Bawa Paskibraka Ke BPIP

LAMPUNG BARAT, BN - Dalam upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dulu, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mengajak anggota Paskibraka dan Pramuka melakukan kunjungan inspiratif ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Kamis 20 November 2025.

Kunjungan itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah sekaligus langkah nyata membentuk generasi penerus berkarakter Pancasila atas keberhasilan anggota Paskibraka tahun 2025 melakukan pengibaran sang saka Bendera Merah Putih pada hari jadi Republik Indonesia lalu.

Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus didampingi sejumlah Kepala Perangkat



Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bersama anggota Paskibraka dan Pramuka saat mengunjungi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Kamis 20 November 2025. (ist)

Daerah ditemui langsung oleh wakil ketua BPIP Nasional Rima Agristina. Tidak hanya menyambut dengan hangat, ia juga memberikan pembinaan ideologi Pancasila kepada anggota Paskibraka Lampung Barat dan Kabupaten Solok.

Dikatakan Parosil Mabsus, kunjungan ini bukan sekadar perjalanan wisata.

Parosil Mabsus menilai kunjungan ini memiliki nilai

strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan generasi muda. Ia mengaku bahagia dan berterima kasih atas sambutan BPIP yang telah berbagi inspirasi kepada para Paskibraka Lampung Barat.

"Arahan yang disampaikan Ibu Rima Agristina sangat bermakna. Mudah-mudahan Paskibraka Lampung Barat yang berkunjung ke BPIP ini dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," harap Parosil Mabsus.

Menurut kepala daerah dua periode itu kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menumbuhkan karakter kebangsaan di kalangan remaja.

(Taufik)

Jalan Poros Kecamatan Air Sugihan OKI Dibangun

OKI, BN - Konektivitas antar wilayah di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir timur. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan desa menjadi kunci menjawab persoalan tersebut.

"Masyarakat OKI menghadapi tantangan besar dalam konektivitas antar wilayah, terutama di kawasan pesisir timur. Penguatan infrastruktur menjadi langkah mutlak untuk menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru," ujar Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki, pada Rakor Forum CSR Kabupaten OKI, Pekan lalu.

Menurut Muchendi, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan. "Peran swasta dan pemerintah desa sangat penting, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar. Sinergi inilah yang menjadi kunci," katanya.

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten OKI membangun jalan poros sepanjang 4,5 kilometer di Kecamatan Air Sugihan. Pekerjaan meliputi pengecoran dan pengerasan jalan yang melintasi Desa Suka Mulya Dusun 1, Desa Pangkalan Damai, Desa Kerta Mukti, Rengas Abang, hingga poros kecamatan.



Pembangunan jalan cor beton oleh PT OKI Pulp

"Pembangunan kami lakukan bertahap, fokus pada jalan poros antar desa agar akses ekonomi dan sosial masyarakat semakin terbuka," ujar Man Winardi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKI.

Wilayah Air Sugihan, yang berjarak sekitar tiga jam perjalanan menggunakan speed boat dari Kota Palembang, menjadi prioritas perbaikan infrastruktur karena letaknya yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Dukungan juga datang dari sektor swasta.

Perusahaan pulp dan kertas terbesar di daerah itu, PT OKI Pulp and Paper Mills, turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), perusahaan tersebut membangun jalan cor beton sepanjang 1,3 kilometer di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan. Jalan selebar delapan meter itu dibangun menggunakan konstruksi wiremesh dengan ketebalan cor 20 sentimeter. Untuk proyek ini, OKI Pulp menggelontorkan dana CSR sebesar Rp3,4 miliar. "Sebagai bentuk dukungan dan kepedulian perusahaan terhadap program prioritas Pemkab OKI dalam menyediakan infrastruktur jalan yang mantap," Ujar Gadang Hartawan, Vice Direktur PT OKI Pulp and Paper.

Kepala Desa Bukit Batu, Rumaidah, mengatakan pembangunan ini menjadi simbol kemandirian desa dalam membangun infrastruktur tanpa bergantung pada dana pemerintah. (Nurfitri)

Erwin Satra Terpilih Dalam Pilkades PAW Desa Segara Kembang

BATURAJA, BN - Proses Pemilihan kepala desa Penganti Antar Waktu (PAW) desa Segara Kembang kecamatan Lengkong kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatra Selatan untuk sisa masa jabatan 2025-2028 berjalan dengan aman dan kondusif.

Acara pemilihan kepala desa PAW diselenggarakan di Balai desa Segara Kembang pada hari sabtu (11-10-2025) mengingat kepala desa yang menjabat sebelumnya meninggal dunia.

Agenda pemilihan kepala desa PAW ini bertujuan untuk memilih kepala desa yang nantinya akan melanjutkan kepala desa sebelumnya. Proses pemilihan ini melalui beberapa tahap, di mulai dari penjaringan calon, seleksi serta proses pemilihan itu sendiri.

Persertanya ada 2 orang warga segara kembang yang mendaftarkan sebagai calon, maka panitia melakukan



Erwin Sastra nomor urut 2 dan proses Pilkades Segara Kembang. (azhari)

beberapa tahapan sehingga 2 orang calon yang melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Penduduk Miskin di Kab Bogor Turun Dari 7,05% Jadi 6,25%



Bupati Bogor Rudy Susmanto (Tengah). (eml)

BOGOR, BN - Pemkab Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin di Kab Bogor turun menjadi 6,25 persen di 2025. Angka tersebut jauh lebih rendah dari persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat 7,46 persen dan Nasional 9,63 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Bambam Setia Aji menjelaskan, Kab Bogor menjadi salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat sejak tahun 2007. Hal tersebut karena jumlah penduduk terbesar di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan diperkirakan lebih 6 juta jiwa pada 2025 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Walaupun jumlah penduduk miskin 446.790 orang berbanding dengan 6 juta Jiwa penduduk Kabupaten Bogor, Rasio kemiskinan di Kabupaten Bogor ini justru lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tren penurunan kemiskinan juga tercatat sejak 2021 dengan angka kemiskinan berada di 8,13 persen, kini turun ke 6,25 persen di 2025," jelas Bambam.

Bambam mengungkapkan, artinya sekitar 120 ribu orang telah keluar dari zona kemiskinan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata 24 ribu orang per tahun. Angka ini dianggap sebagai hasil nyata dari berbagai program pemerintah daerah yang menyentuh lapisan masyarakat miskin.

"Selain itu Kabupaten Bogor sudah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor dengan total alokasi anggaran di tahun 2025 mencapai 700 Miliar, Beberapa program utama yang disebut sebagai kontributor penurunan kemiskinan adalah, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 3.406 unit rutilahu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat tidak mampu," ungkapnya.

Ia melanjutkan, kemudian program hunian tetap yang menyediakan rumah layak bagi keluarga terdampak bencana alam. Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi mikro, untuk meningkatkan pendapatan warga miskin secara berkelanjutan.

"Pemerintah daerah optimistis bahwa upaya berkelanjutan dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial akan semakin mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, salah satunya di tahun 2026 Bupati Bogor menganggarkan 1 Triliun untuk jaminan kesehatan 100% Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor," kata Bambam.

Bambam menuturkan, meski demikian, Pemkab Bogor menyadari masih menghadapi tantangan serius. Jumlah penduduk 6 juta yang sangat besar untuk tingkat Kabupaten yang jumlahnya bahkan lebih besar dari 25 provinsi lainnya di Indonesia juga tingginya risiko bencana alam menjadi potensi pemicu kemiskinan baru.

"Kami terus berupaya agar Kabupaten Bogor yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia bisa mengangkat kemiskinan bersama-sama. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan stakeholder lainnya terus diperkuat agar penanganan kemiskinan efektif dan menyeluruh," pungkas Bambam. (eml)

Dasril, ST, Menang Telak Dalam Pemilihan PAW Kepala Desa Tanjung Kemala



BATURAJA, BN - Pemerintah Desa Tanjung Kemala, sukses melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Rabu (08-10-2025), bertempat di Gedung Balai Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kab Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Akhir Pemilihan menetapkan Dasril ST, sebagai Kepala Desa PAW dengan perolehan 671 suara, mengungguli Jefri, Spd yang meraih 365 Suara dan Ir. Dainal Wajedi, M.Si 93 suara. Sementara yang blanko 14 suara, sedangkan suara yang sah 1.129 suara. Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Desa yang kosong sebelum masa jabatan berakhir dan berlangsung dengan tertib, lancar, serta Demokrasi.

Pelaksanaan PAW dihadiri ketua BPD beserta Anggota nya dan Kapolsek Baturaja Timur AKP. Azwan, SH, MH, dan Personil Dari TNI sebagai Pengamanan kegiatan tersebut dan juga ada beberapa Anggota DPRD Kab Oku yang turut menyaksikan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Tanjung Kemala.

Saat ditemui di kediamannya Dasril, ST, Calon Kepala Desa PAW mengatakan kepada media ini, "Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, pemerintah desa, BPD dan Pihak keamanan dari Polres Oku dan dari TNI dan seluruh warga yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini, Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan baik dan membawa kemajuan bagi Desa Tanjung Kemala," ucapnya.

Pemilihan ini mencerminkan tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin desa serta memperhatikan semangat gotong royong dan komitmen bersama dalam membangun Desa. (M. Azhari)

Bangkitkan Marwah Sepak Bola Labuhanbatu, Boster Sitio Jabat Manager Tim Poslab Liga 4



LABUHANBATU, BN - Klub sepakbola Persatuan Olahraga Sepak Bola Labuhanbatu (Poslab) memasuki babak baru jelang bergulirnya Liga 4 PSSI 2025/2026 zona Sumatera Utara, Senin (17/11/2025).

Manajemen resmi menunjuk H. Boster Sitio sebagai Manager Tim, sebuah keputusan strategis yang diyakini dapat mengangkat kembali marwah klub kebanggaan masyarakat Labuhanbatu ini.

Sosok Boster Sitio bukan nama baru di dunia olahraga daerah. Selain menjabat sebagai Anggota DPRD Labuhanbatu dari Fraksi Golkar, ia juga memimpin KONI Labuhanbatu, menjadikannya figur yang akrab dengan dinamika pembinaan atlet dan olahraga prestasi.

Penunjukan ini langsung disambut Boster dengan komitmen penuh, "Saya siap mengabdi amanah ini. Poslab harus kembali diperhitungkan, dan itu dimulai dari persiapan yang disiplin, seleksi yang ketat, dan manajemen tim yang profesional," tegas Boster kepada Jurnalis (Senin, 17/11/2025).

Menurut Boster, fondasi kekuatan Poslab bukan hanya berada pada strategi permainan, tetapi juga pada mentalitas tim, kultur kerja, dan keberanian melakukan pemberanahan. Ia memastikan dirinya tak hanya hadir sebagai simbol, tetapi sebagai motor penggerak dalam proses transformasi tim.

Manajemen Poslab menilai kehadiran Boster sebagai momentum penting. Dengan jejeran luas, pengalaman organisasi, serta reputasinya mengawali pembinaan olahraga daerah, Boster diyakini membawa standar baru dalam pengelolaan tim. (M. Sukma)

Hadiri Wisuda Angkatan IV STITA, Ini Pesan Wabup Labuhanbatu



LABUHANBATU, BN – Ada beberapa pesan Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri saat menghadiri Wisuda Sarjana Angkatan IV Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhari (STITA) Labuhanbatu, di Gedung Aula Hotel Almira, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Rantau Utara, Sabtu (22/11/2025).

Diantara beberapa pesan tersebut Wabup mengatakan para wisudawan hari ini bukan hanya menyandang gelar sarjana, tetapi memikul amanah ilmu dalam Islam, ilmu bukan sekedar pengetahuan tetapi cahaya yang menerangi langkah, memperbaiki akhlak, dan menghadirkan manfaat bagi umat.

"Saya yakin bekal ilmu tarbiyah diperoleh di STITA

Al-Bukhari akan menjadi pondasi kuat bagi kalian dalam menjadi pendidik yang mencerdaskan bukan sekedar mengajar, menjadi pendidik umat yang lembut hati namun kuat prinsip, dan menjadi teladan akhlak bukan hanya pengetahuan," kata Wabup.

Wabup juga menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang setting tingginya kepada orang tua, dan para dosen. Keberhasilan hari ini adalah buah doa, kesabaran, bimbingan dan pengorbanan yang tiada terukur. Semoga apa yang anda tanam menjadi amal jariyah yang tidak terputus.

Lebih lanjut, kata Wabup, Pemkab Labuhanbatu

terus berkomitmen mendukung kemajuan dunia pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. "Kami percaya karena pendidikan adalah pintu peradaban, dan lulusan seperti hari ini adalah bagian dari modal pembangunan sumber daya manusia labuhanbatu yang unggul, berdaya saing dan berkarakter," ujarnya.

"Kami berharap STITA Al-Bukhari terus memperkuat mutu akademik, meningkatkan kolaborasi, serta mencetak generasi islami yang adaptif, moderat, dan relevan dengan tantangan zaman," tambahnya.

Menutup sambutannya, Wabup mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati angka-

tan IV STITA Al-Bukhari, semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama.

Ketua Yayasan STITA Al-Bukhari Dr. H. Bukhari menyampaikan yayasan ini beroperasi dimulai tahun 2012 sampai sekarang sudah 2025, artinya sudah berjalan 13 Tahun. Ia juga menyampaikan bahwasanya apabila ada anak yang ingin masuk di sini dengan kemampuan hafiz 30 juz, maka anak tersebut akan diberikan uang kuliah gratis sampai tamat, kalau 20 juz akan kita beri uang kuliah gratis 3 tahun, 10 juz gratis uang kuliah 2 tahun, 5 juz gratis 1 tahun dan kalau pun hafal cuma di 30 juz tetap kita beasiswa 1 semester.

Turut hadir Mewakili Polres, Mewakili Kodim 0209/Lb, Ketua STITA Dr. Jupriaman, Kakan Kemenag, Rektor ULB, Ketua FKUB, Ketua MUI, Kabid Kips Kominfo, Pimpinan Bank BNI Syariah, Para Ormas, Para Orang Tua Wisudawan/Wisudawati dan Tamu Undangan Lainnya.

(M.Sukma)

Desa Kertajaya Salah Satu Penerima Manfaat Program Inpres 2025

PANGANDARAN, BN – Dengan masyarakat mayoritas Petani didukung pula areal pertanian yang luas sawah irigasi teknis 330,0 Ha sawah irigasi 0,5 teknis 12 Ha sawah tada hujan 5 Ha sementara sawah pasang surut 0,00 Ha dengan jumlah keseluruhan mencapai 347 Ha hampir dari keseluruhan merupakan lahan produktif tanaman padi yang kesemuanya lahan di atas sangat membutuhkan aliran air cukup dan lancar.



Dari hasil penelusuran lapangan, keharmonisan diantara kelompok tani terjalin kerja sama baik dengan pemerintah desa untuk diajukan kepada pihak yang berwenang atas kebutuhan para petani untuk di sampaikan ke BBWS Citanduy.

Siring berjalan waktu beberapa titik pun terealisasi masuk di program Inpres tahun 2025 melalui Satker SDA PPK OP 4. Pekerjaan perbaikan saluran sudah hampir diselesaikan.

Antusias warga setempat merespon program ini, salah satu titik pekerjaan di wilayah desa Kertajaya yang telah ditemui bidiknasional.com di dusun Kertajaya Desa Kertajaya dengan panjang segmen 1 300 meter yang sudah

terselesaikan dan segmen 2 mencapai 300 meter masih dalam tahap pengerjaan dengan jumlah seluruh 600 meter. Teknis pengerjaan menggunakan pasangan batu.

Sementara, saat dikonfirmasi masalah pekerjaan, Pelaksana lapangan Wagiman menyampaikan, "Alhamdulillah pekerjaan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dari awal sosialisasi untuk merekrut pekerja bahan dari segi bahan material dan teknis pekerjaan disesuaikan dengan arahan dari kantor BBWS Citanduy," ujar Wagiman.

Dia berharap bisa maksimal dari segi kualitas pekerjaan. "Harapan lain bisa diterima di masyarakat petani khususnya," ucapnya menutup perbincangan.

Hal senada disampaikan TPM, Pelik, "sebagai Petugas dari kantor saya selalu berkoordinasi dengan pelaku pekerjaan sesuai arahan untuk mencapai hasil yang maksimal tentunya, begitupun teknis disesuaikan dengan spek yang sudah ditentukan. Harapan program Inpres ini bisa diterima masyarakat untuk mendukung pemerataan air yang maksimal serta mendukung ketahanan pangan untuk tanaman padi khususnya," jelasnya. (Karsono)

Atlet Labuhanbatu Raih 3 Medali di Kejurprov Judo Piala Konsulat Jepang



Tiga atlet Judo Labuhanbatu yang meraih 3 Medali di Kejurprov Judo Piala Konsulat Jepang. (sukma)

LABUHAN BATU, BN – Kontingen Judo Labuhanbatu akhirnya membuktikan optimisme yang sejak awal digaungkan. Setelah sebelumnya diberitakan siap "mengguncang" Kejurprov Judo Piala Konsulat Jepang (Konjen) 2025, para atlet yang berlaga di GOR Serdang Bedagai berhasil membawa pulang prestasi membanggakan untuk daerah.

Tiga atlet senior berhasil meraih medali pada kejuaraan bergengsi tersebut. Ferdi Juliantri, yang turun di kelas "55 Kg Senior Putra, tampil impresif dan meraih Juara II (Perak) setelah melalui partai-partai sengit. Sementara itu, di sektor putri, dua atlet andalan Labuhanbatu juga menorehkan hasil positif. Sherina Zahwa Siregar yang bertarung di kelas "45 Kg Senior Putri, memastikan Juara

III (Perunggu), diikuti oleh Safira di kelas "52 Kg Senior Putri, yang juga meraih Juara III (Perunggu). Hasil ini sekaligus menjawab optimisme yang sebelumnya muncul lewat pemberitaan Bidik Nasional. Com dengan judul "Judo Labuhanbatu Siap Mengguncang Piala Konjen Jepang 2025". Prediksi tersebut terbukti benar Labuhanbatu tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi benar-benar menggebrak arena dengan raihan medali dari para judoka mudanya.

Ketua Pengkab PJSI La-

buhanbatu, Asrol Aziz Lubis (Acun), menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. "Ini adalah bukti bahwa kerja keras para atlet dan pelatih tidak sia-sia. Kita tidak hanya datang untuk bertanding, tetapi membawa

(M.Sukma)

Kajari Baru Beltim, Humoris dan Terbuka Terhadap Media



Kajari Baru Beltim, Agus Taufikurrahman. (ist)

materi, Kajari terus mengajak wartawan untuk berengkrama dan melempar candaan segera.

MANGGAR, BN – Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Agus Taufikurrahman kumpul-kumpul dengan puluhan wartawan Kabupaten Beltim, pada acara silaturahmi 'Coffe Morning' bersama Insan Per Warung Kopi Aput Kecamatan Manggar, Jumat (21/11/25) Pagi.

Canda dan tawa menghiasi suasana. Atmosfer tampak cair, tidak ada jarak antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang baru menjabat dua mingguan ini dan pewarta. Seakan tak pernah habis

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Komarudin, Sekdes Desa Laya Menang Dalam Pilkades PAW



Komarudin nomor urut 3 dan petugas mengawas proses pemilihan Kades Laya. (azhari)

BATURAJA, BN – Pemerintah Desa Laya, Kecamatan Baturaja Barat, melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Antar Waktu (PAW), di Gedung Posyandu Desa Laya, Kec Baturaja Barat Kab. Oku, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (11-10-2025).

Pemilihan ini dilakukan karena Kades Definitif sebelumnya meninggal dunia, sehingga untuk mengisi kekosongan pada pemerintahan Desa Laya hingga pemilihan serentak yang akan datang, maka di adakanlah Pilkades PAW ini. Sebelum melakukan pemilihan PAW, Pemdes Desa Laya telah membentuk panitia pemilihan guna menerima para calon sesuai dengan peraturan dari pemerintah tentang pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Dari hasil seleksi panitia, muncul 3 orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan, yaitu, Hariantina yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Laya, Samsul Hazairin pernah menjabat Kepala Desa Laya dan Komarudin yang menjabat Sekdes Desa Laya saat ini. Kemudian, pelaksanaan PAW Desa Laya dengan menggunakan pemungutan surat suara, "Kepada semua calon kita harapkan agar mengikuti Pilkades PAW ini secara demokrasi dan harus sama-sama mentaati aturan yang ada," ujar Ketua Panitia Pilkades Desa Laya dalam memberikan sambutannya.

Dari hasil pemilihan, maka di dapat hasil suara terbanyak diperoleh oleh Komarudin dengan 249 suara, sementara Hariantina 169 suara dan Samsul Hazairin 57 suara, blanko 33 suara sedangkan mata pilih 586 suara dan yang memberikan suaranya berjumlah 508 Suara.

Menurut ketua Pilkades PAW Desa Laya mengatakan, "Pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Laya ini untuk pertama kali dilakukan, dan Alhamdulillah sukses berjalan dengan lancar," ujarnya. "Setelah ini panitia akan menyerahkan hasil ini ke BPD dan kemudian BPD meneruskan ke Camat, selanjutnya ke Dinas PMD untuk proses pelantikan," ujarnya.

Komarudin yang sebelumnya menjabat Sekdes Desa Laya dan menang dalam pemilihan Pilkades PAW Desa Laya mengatakan kepada media ini di kediannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan PAW Kepala Desa," ucappannya.



Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita Gelar Jumat Bersih Bersama PT Siringo Ringo



Kegiatan Jumat bersih Pemkab Labuhan Batu. (sukma)

LABUHANBATU, BN – Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita memberi arahan seluruh bawannya untuk melakukan Jum'at Rutin bergotong royong. Camat Rantau Utara melaksanakan arahan bupati dengan bergotong royong bersama anggota dan dinas terkait di jalanan baru adam malik by pass, Jum'at (14/11/2025).

Camat juga meminta bantuan kepada perusahaan PT. Siringoringo alat berat untuk membersihkan sampah yang berada di jalan baru by pass simpang PT. Siringoringo dan kayu raja. Selain perusahaan, Camat Rantau Utara juga mengajak Dinas Lingkungan hidup serta lurah dan kepala lingkungan.

Camat Rantau Utara terus mendukung program-program Bupati Labuhanbatu membangun desa menata kota. Bupati Labuhanbatu terus dengan mengajak seluruh OPD, Camat, Kepala desa, Lurah dan perusahaan selaku mitra pemerintah untuk membangun desa dan menata kota. (M.Sukma)

Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Respon Aduan Masyarakat



Petugas Satres Narkoba Polres Labuhanbatu ketika mengecek aduan Masyarakat. (ist)

LABUHANBATU, BN – Menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial oleh kelompok mahasiswa terkait dugaan aktivitas seorang bandar narkoba bernama Isak, Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu bergerak cepat melakukan penyelidikan di beberapa lokasi.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 12 November 2025 di Jalan Taruna Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan dua lokasi lain yang sebelumnya pernah dihuni oleh terduga.

Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Iwan Mashuri, S.H., M.H. menjelaskan, tim yang dipimpin Kanit I Satres Narkoba IPDA Sastrawan Ginting bersama personelnya turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Dalam penyelidikan itu, petugas melakukan penyelidikan kepada warga sekitar guna mencari informasi dan keberadaan Isak yang diduga sebagai bandar narkoba. Dari hasil interrogasi dan keterangan para saksi, diketahui bahwa benar Isak pernah tinggal di lingkungan tersebut, namun sudah delapan bulan tidak pulang ke rumah. Warga sekitar juga menegaskan tidak pernah melihat adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika di lokasi itu sejak kepergian Isak.

"Dari hasil penyelidikan sementara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kegiatan narkotika di tempat yang menjadi aduan masyarakat. Namun demikian, kami akan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada celah bagi pelaku peredaran narkoba di wilayah Labuhanbatu," ujar AKP Iwan Mashuri.

Kasat menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen merespons cepat setiap informasi yang datang dari masyarakat. "Perintah Bapak Kapolres Labuhanbatu sudah jelas – narkoba adalah musuh bersama. Kami akan terus bergerak menelusuri setiap laporan, karena dukungan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba," tegasnya. (M.Sukma)

Eks Bupati ...*Sambungan hal 1*

"Betul, jadi dalam perkara yang lain SPPD fiktif (Petrus jadi tersangka). Saat ini memang sedang dilakukan pendalaman," ujar Kasi Intel Kejari Kepulauan Tanimbar, Garuda Cakti Vira Tama kepada detikcom, Jumat (21/11/2025).

Dalam situs kejaksaan terungkap bahwa anggaran perjalanan dinas yang diduga dikenakan Petrus itu bersumber dari Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar tahun 2020. Kerugian negara mencapai Rp 1.092.917.664.

Kerugian negara itu berdasarkan hasil audit tim auditor Kejati Maluku. Sementara untuk kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh PF (Petrus Fatlolon) senilai Rp 314.598.000," demikian keterangan terkait jumlah kerugian negara.

Dalam situs kejaksaan terungkap bahwa anggaran perjalanan dinas yang diduga dikenakan Petrus itu bersumber dari Sekretariat Daerah Kepulauan Tanimbar tahun 2020. Kerugian negara mencapai Rp 1.092.917.664.

"Kerugian negara itu berdasarkan hasil audit tim auditor Kejati Maluku. Sementara untuk kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh PF (Petrus Fatlolon) senilai Rp 314.598.000," demikian keterangan terkait jumlah kerugian negara. Terbaru, Petrus kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait penyertaan modal PT Tanimbar Energi tahun 2020-2022. Kasus ini disebut menyebabkan kerugian negara Rp 6,2 miliar.

"Menetapkan PF tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan negara terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi," kata Garuda Cakti. Menurut Garuda, tersangka Petrus sempat menjalani pemeriksaan awal terkait kasus korupsi pernyataan modal di Kantor Kejati Maluku, Kamis (20/11). Petrus kemudian ditetapkan tersangka. "PF jadi tersangka setelah terpenuhinya dua alat bukti yang sah melalui pemeriksaan 57 saksi, analisis terhadap 98 dokumen dan data terkait pernyataan barang bukti elektronik," bebernya.

"Selanjutnya pendalaman keterangan ahli pidana, ahli

Puluhan Miliar ...

sehingga mengakibatkan penyalahgunaan Beban Bantuan Sosial tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;

2. Kesalahan penganggaran dan pembebanan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp 58.546.316.245,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 12.746.356.835,00 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menggambarkan substansi yang sebenarnya;

3. Pengendalian atas pertanggungjawaban Belanja Hibah belum cukup memadai untuk memitigasi resiko penyalahgunaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 1.185.706.835,00;

4. Pengelolaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memperoleh jaminan untuk kegiatan pasca tambang sebesar Rp 7.536.000.000 apa bila pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur merombak mendesak kepada Gubernur Jawa Timur antara lain agar memerintahkan,

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) meningkatkan pemahaman SAP atas pe-

5. Kepala Dinas Energi

Sambungan hal. 1

ngakan Beban Bantuan Sosial;

2. Kepala SKPD terkait supaya lebih teliti dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Kepala SKPD terkait supaya memproses kelebihan pembayaran Belanja Hibah atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan kekurangan volume sebesar Rp 1.185.706.835,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Inspektor supaya melakukan tinjauan lapangan kepada penerima hibah yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada surat peringatan kedua; dan

(Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

tahan desa yang terbuka, partisipatif, transparan dan akuntabel, segera mengajukan informasi dan dokumen pelaksanaan anggaran Dana Desa Ngoro tahun 2025.

Sebagai dasar dalam menjalankan fungsi control social, mendapat klarifikasi atas informasi, data, dan/atau dokument yang menyajikan laporan realisasi penerimaan - penggunaan Dana Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Untuk mengetahui tanggapan, penjelasan, koreksi sebagai hak jawab Kepala Desa Ngoro, ikuti Liputan Khusus BN edisi selanjutnya. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

b. Surat Perjanjian antara PPK dengan masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan, yang memuat rincian volume item pekerjaan termasuk syarat dan spesifikasi item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor pelaksana.

Kondisi Tersebut Disebabkan:

Kepala Dinas PUPRPKP dan PPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Dinas PUPRPKP menyatakan sependapat dan akan segera menindak lanjuti temuan-temuan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Malang agar memerintahkan Kepala Dinas untuk menginstruksikan PPK terkait supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada kontraktor pelaksana, konsultasi pengawas.

Dan, memproses kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.407.137.524,91 dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian ganti kerugian daerah.

Berikut diketahui secara pasti apakah rekomendasi BPK RI, tersebut telah ditindak lanjuti Wali Kota Malang, dan apakah perintah Wali Kota Malang secara patuh sudah dilaksanakan Kepala Dinas PUPRPKP? Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang berkecambah di benak publik tersebut.

Redaksi Suara Kabar BIDIK NASIONAL pada, Rabu 17 September 2025 telah mengajukan permintaan konfirmasi secara resmi melalui surat nomor 072/202/KON/LP/IX/RED-BN ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, numun hingga, Jum'at 21 November 2025 belum mendapat respon jawaban. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

tahan desa yang terbuka, partisipatif, transparan dan akuntabel, segera mengajukan informasi dan dokumen pelaksanaan anggaran Dana Desa Ngoro tahun 2025.

Sebagai dasar dalam menjalankan fungsi control social, mendapat klarifikasi atas informasi, data, dan/atau dokument yang menyajikan laporan realisasi penerimaan - penggunaan Dana Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Untuk mengetahui tanggapan, penjelasan, koreksi sebagai hak jawab Kepala Desa Ngoro, ikuti Liputan Khusus BN edisi selanjutnya. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

b. Surat Perjanjian antara PPK dengan masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan, yang memuat rincian volume item pekerjaan termasuk syarat dan spesifikasi item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor pelaksana.

Kondisi Tersebut Disebabkan:

Kepala Dinas PUPRPKP dan PPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Dinas PUPRPKP menyatakan sependapat dan akan segera menindak lanjuti temuan-temuan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Malang agar memerintahkan Kepala Dinas untuk menginstruksikan PPK terkait supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada kontraktor pelaksana, konsultasi pengawas.

Dan, memproses kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.407.137.524,91 dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian ganti kerugian daerah.

Berikut diketahui secara pasti apakah rekomendasi BPK RI, tersebut telah ditindak lanjuti Wali Kota Malang, dan apakah perintah Wali Kota Malang secara patuh sudah dilaksanakan Kepala Dinas PUPRPKP? Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang berkecambah di benak publik tersebut.

Redaksi Suara Kabar BIDIK NASIONAL pada, Rabu 17 September 2025 telah mengajukan permintaan konfirmasi secara resmi melalui surat nomor 072/202/KON/LP/IX/RED-BN ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, numun hingga, Jum'at 21 November 2025 belum mendapat respon jawaban. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

tahan desa yang terbuka, partisipatif, transparan dan akuntabel, segera mengajukan informasi dan dokumen pelaksanaan anggaran Dana Desa Ngoro tahun 2025.

Sebagai dasar dalam menjalankan fungsi control social, mendapat klarifikasi atas informasi, data, dan/atau dokument yang menyajikan laporan realisasi penerimaan - penggunaan Dana Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Untuk mengetahui tanggapan, penjelasan, koreksi sebagai hak jawab Kepala Desa Ngoro, ikuti Liputan Khusus BN edisi selanjutnya. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

b. Surat Perjanjian antara PPK dengan masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan, yang memuat rincian volume item pekerjaan termasuk syarat dan spesifikasi item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor pelaksana.

Kondisi Tersebut Disebabkan:

Kepala Dinas PUPRPKP dan PPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Dinas PUPRPKP menyatakan sependapat dan akan segera menindak lanjuti temuan-temuan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Malang agar memerintahkan Kepala Dinas untuk menginstruksikan PPK terkait supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada kontraktor pelaksana, konsultasi pengawas.

Dan, memproses kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.407.137.524,91 dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian ganti kerugian daerah.

Berikut diketahui secara pasti apakah rekomendasi BPK RI, tersebut telah ditindak lanjuti Wali Kota Malang, dan apakah perintah Wali Kota Malang secara patuh sudah dilaksanakan Kepala Dinas PUPRPKP? Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang berkecambah di benak publik tersebut.

Redaksi Suara Kabar BIDIK NASIONAL pada, Rabu 17 September 2025 telah mengajukan permintaan konfirmasi secara resmi melalui surat nomor 072/202/KON/LP/IX/RED-BN ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, numun hingga, Jum'at 21 November 2025 belum mendapat respon jawaban. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

tahan desa yang terbuka, partisipatif, transparan dan akuntabel, segera mengajukan informasi dan dokumen pelaksanaan anggaran Dana Desa Ngoro tahun 2025.

Sebagai dasar dalam menjalankan fungsi control social, mendapat klarifikasi atas informasi, data, dan/atau dokument yang menyajikan laporan realisasi penerimaan - penggunaan Dana Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Untuk mengetahui tanggapan, penjelasan, koreksi sebagai hak jawab Kepala Desa Ngoro, ikuti Liputan Khusus BN edisi selanjutnya. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

b. Surat Perjanjian antara PPK dengan masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan, yang memuat rincian volume item pekerjaan termasuk syarat dan spesifikasi item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor pelaksana.

Kondisi Tersebut Disebabkan:

Kepala Dinas PUPRPKP dan PPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Dinas PUPRPKP menyatakan sependapat dan akan segera menindak lanjuti temuan-temuan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Malang agar memerintahkan Kepala Dinas untuk menginstruksikan PPK terkait supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada kontraktor pelaksana, konsultasi pengawas.

Dan, memproses kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.407.137.524,91 dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian ganti kerugian daerah.

Berikut diketahui secara pasti apakah rekomendasi BPK RI, tersebut telah ditindak lanjuti Wali Kota Malang, dan apakah perintah Wali Kota Malang secara patuh sudah dilaksanakan Kepala Dinas PUPRPKP? Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang berkecambah di benak publik tersebut.

Redaksi Suara Kabar BIDIK NASIONAL pada, Rabu 17 September 2025 telah mengajukan permintaan konfirmasi secara resmi melalui surat nomor 072/202/KON/LP/IX/RED-BN ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, numun hingga, Jum'at 21 November 2025 belum mendapat respon jawaban. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

tahan desa yang terbuka, partisipatif, transparan dan akuntabel, segera mengajukan informasi dan dokumen pelaksanaan anggaran Dana Desa Ngoro tahun 2025.

Sebagai dasar dalam menjalankan fungsi control social, mendapat klarifikasi atas informasi, data, dan/atau dokument yang menyajikan laporan realisasi penerimaan - penggunaan Dana Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Untuk mengetahui tanggapan, penjelasan, koreksi sebagai hak jawab Kepala Desa Ngoro, ikuti Liputan Khusus BN edisi selanjutnya. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

b. Surat Perjanjian antara PPK dengan masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan, yang memuat rincian volume item pekerjaan termasuk syarat dan spesifikasi item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor pelaksana.

Kondisi Tersebut Disebabkan:

Kepala Dinas PUPRPKP dan PPK kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Dinas PUPRPKP menyatakan sependapat dan akan segera menindak lanjuti temuan-temuan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Malang agar memerintahkan Kepala Dinas untuk menginstruksikan PPK terkait supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada kontraktor pelaksana, konsultasi pengawas.

Dan, memproses kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.407.137.524,91 dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian ganti kerugian daerah.

Berikut diketahui secara pasti apakah rekomendasi BPK RI, tersebut telah ditindak lanjuti Wali Kota Malang, dan apakah perintah Wali Kota Malang secara patuh sudah dilaksanakan Kepala Dinas PUPRPKP? Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang berkecambah di benak publik tersebut.

Redaksi Suara Kabar BIDIK NASIONAL pada, Rabu 17 September 2025 telah mengajukan permintaan konfirmasi secara resmi melalui surat nomor 072/202/KON/LP/IX/RED-BN ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, numun hingga, Jum'at 21 November 2025 belum mendapat respon jawaban. (Toddylipsus)

Sambungan hal. 1

tahan desa yang terbuka, partisip



Flyover Gedangan Bakal Dibangun Sepanjang 475 Meter

Bupati Subandi : Kebutuhan Anggaran Pembebasan Lahan Diperkirakan Capai Rp 340 Miliar

SIDOARJO, BN - Kementerian PUPR merancang pembangunan Flyover Gedangan dengan panjang konstruksi mencapai 475 meter. Proyek ini membutuhkan pembebasan 157 bidang lahan terdampak. Sebagian besar bidang yang harus dibebaskan merupakan area usaha. Di antaranya terdapat bangunan kantor Polsek Gedangan serta sebuah masjid.

BUPATI Sidoarjo Subandi memastikan pembebasan lahan akan dimulai pada 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan tengah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Proses pembebasan lahan akan ditangani Satgas khusus yang beranggotakan unsur BPN, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Pembentukan satgas ini

dibahas dalam rapat di Pemkab Sidoarjo, Rabu (19/11/2025).

Rapat tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo, Dandim, Kajari, Kepala BPN Sidoarjo, Ketua DPRD, serta sejumlah perwakilan lainnya. "Kebutuhan anggaran pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 340 miliar. Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan sekitar Rp 200

miliar, sementara sisanya akan diajukan melalui pendanaan pusat," ujar Subandi.

Luas lahan yang masuk dalam trase pembangunan mencapai 13.400 meter persegi. Nilai tersebut belum termasuk tanah sisa yang tidak dapat dimanfaatkan, sehingga kebutuhan anggaran minimal diproyeksikan Rp 260 miliar hingga maksimal Rp 340 miliar.

"Alhamdulillah, kami bersama Forkopimda menyimpulkan bahwa Flyover Gedangan tetap berjalan. Satgas pembebasan lahan juga segera dibentuk," kata Subandi.

Ia menjelaskan appraisal harga tanah baru dapat dilakukan setelah terbitnya Penetapan Lokasi (Penlok). "Penlok harus terbit dulu supaya appraisal bisa berjalan. Jika ada bidang bernilai tinggi atau menimbulkan keberatan, BPN dan pengadilan akan menangani sesuai ketentuan," tambahnya.

Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan dapat dimulai tepat waktu pada 2026. Percepatan proses diyakini akan mendorong realisasi pembangunan flyover untuk mengatasi kemacetan di kawasan Gedangan. (Ted)



Bupati Subandi saat rapat pembangunan Fly Over Gedangan di Ruang Opsroom Pemkab. (ist)

Bupati Sidoarjo: Semua Proyek Betonisasi Harus Selesai Tepat Waktu



Bupati Subandi saat Pengecekan betonisasi di Kureksari Waru. (ist)

SIDOARJO, BN - Sedikitnya 14 ruas jalan di sejumlah wilayah Kabupaten

langsung setiap titik pekerjaan. Selain monitoring melalui dinas

Sidoarjo tengah menjalani proses betonisasi pada 2025. Selain itu, terdapat dua proyek pembangunan jembatan yang juga sedang dikerjakan.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan seluruh proyek harus dikerjakan sesuai aturan dan spesifikasi. Ia memastikan proses berjalan tepat waktu dengan memantau

terkait, Subandi rutin melakukan sidak ke lapangan. Salah satunya saat mengecek betonisasi di beberapa lokasi di Kecamatan Waru.

Di Jalan Kureksari-Kepuhkiriman, Subandi menemukan beberapa persoalan yang harus segera dikoreksi. Salah satunya terkait bangunan rumah sekitar proyek yang belum memiliki kelengkapan surat. "Temuan ini akan kita tindak lanjuti. Dinas PU Bina Marga dan SDA bersama BPN akan mengawali penyelesaian," ujarnya.

Subandi juga menyoroti pentingnya pembersihan material sisa galian. Ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut merupakan area industri sehingga tidak

boleh terganggu proses pengerjaannya.

Di lokasi lain, Jalan Kedungrejo-Wadungasri, ia meminta pekerjaan dipercepat. Tambahan shift kerja dianggap perlu agar proyek dapat selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Sidak berlanjut ke Tambak Sumur dan Tambakrejo. Di sana, progres dinilai cukup baik, namun masih perlu peningkatan terutama pada aspek pembersihan galian.

Di Jalan Tambakrejo, Subandi memberi perhatian khusus pada kualitas beton. Ia menemukan bagian tepi beton yang mulai rusak meski spesifikasi menggunakan K-450, sehingga meminta pelaksana memperbaikinya.

Dinas PU Bina Marga dan SDA

menyebut seluruh proyek betonisasi berjalan sesuai rencana. Target penyelesaian di 11 ruas jalan pada 20 Desember dinilai tetap realistik karena progres masih sesuai jadwal.

"Sampai saat ini tidak ada keterlambatan. Semua berjalan sesuai jadwal. Semoga bisa selesai sebagaimana waktu yang ditentukan," ucup Kepala Dinas PUBMSDA Dwi Eko Saptono.

Program betonisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo meningkatkan pemerataan infrastruktur, terutama di kawasan industri dan permukiman padat. Masyarakat pun menyambut baik program tersebut karena manfaatnya dirasakan langsung. (Ted)

Frontage Road Waru - Buduran Bakal Tersambung Semua di 2026

SIDOARJO, BN - Pembangunan frontage road dari Waru hingga Buduran sebagian besar sudah dapat dilalui kendaraan. Namun masih terdapat beberapa titik yang belum tersambung akibat kendala pembebasan lahan.

Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pada 2026 seluruh jalur frontage road tersebut sudah tersambung penuh. Mulai kawasan Waru hingga Buduran.

Target itu dinilai realistik karena sejumlah persoalan krusial sudah mendapatkan solusi. Pemerintah kabupaten juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 40 miliar untuk pembangunan jalan di titik-titik yang sebelumnya tersendat.

"Persoalannya sudah selesai. Tahun depan mulai dibangun, dan anggaran Rp 40 miliar sudah kita siapkan dalam APBD 2026. Kami berharap semua berjalan lancar dan frontage road tembus dari Waru sampai Buduran," ujar Subandi.

Salah satu hambatan utama adalah pembebasan lahan makam di

Waru. Masalah ini kini terurai setelah dibahas dalam rapat bersama terkait pembangunan frontage road kawasan Kedungrejo dan Waru.

Hasil pembahasan menetapkan bahwa pembebasan lahan makam dilakukan melalui pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan. Setelah itu, pengukuran peta bidang segera dilakukan. "Jika ada warga yang meninggal, nantinya bisa dimakamkan di lahan yang baru," tambah Subandi.

Sementara itu, pembebasan lahan makam umum Desa Kedungrejo juga telah menemukan titik terang. Musyawarah desa menyetujui lahan pengganti seluas 1.500 meter persegi di Bungurasih Barat.

Persoalan sertifikat ganda yang sempat menghambat kini juga sudah diselesaikan melalui proses hukum. Pemerintah menugaskan Kepala Bagian Hukum Setda Sidoarjo, Komang Rai Warmawan, untuk mengawal proses tersebut.

Subandi menegaskan proses hukum harus dijalani hingga tuntas agar transaksi lahan di kemudian hari tidak terhambat masalah



Frontage road yang sudah terbangun untuk memperlancar akses masyarakat Waru - Buduran. (ist)

legalitas. Selain itu, Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menentukan langkah-langkah lanjutan. Harapannya pembangunan frontage road segera rampung dan dapat dinikmati masyarakat. Jika seluruh pekerjaan tuntas, jalur pendamping sepanjang 9,4 kilometer itu bisa dilalui penuh dari Waru hingga Buduran tanpa hambatan. (Ted)

Bupati Subandi Dorong Koperasi Merah Putih Menyesuaikan Kebutuhan Masyarakat Sekitar



Koperasi Merah Putih Magersari. (ist)

SIDOARJO, BN - Bupati Sidoarjo Subandi mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (DKMP) untuk menyesuaikan usaha dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sekitar. Menurutnya, kearifan lokal harus menjadi dasar pengembangan koperasi di setiap wilayah.

"Dengan penyesuaian diri terhadap masyarakat sekitar dan kearifan lokal yang ada, KDKMP di Sidoarjo berpotensi maju dan memberi manfaat besar bagi warga," ujar Subandi.

Ia mencontohkan kawasan Tarik yang didominasi aktivitas pertanian. Di wilayah tersebut, koperasi ditorong bergerak di sektor pertanian, seperti menyediakan pupuk dan bibit.

Contoh lainnya berada di Sedati yang memiliki pasar wisata. Koperasi setempat diarahkan mendukung kebutuhan pasar wisata dengan menggandeng pelaku usaha sebagai anggota. "Demikian juga di kawasan tambak. Koperasinya harus menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya," lanjut Subandi.

Secara keseluruhan, terdapat 346 KDKMP di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 28 berada di kelurahan dan 318 di desa. Semuanya telah memiliki badan hukum serta perizinan lengkap, termasuk NIB dan

NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 95 koperasi yang telah beroperasi. Jenis usahanya beragam, mulai simpan pinjam, toko sembako, gerai, peternakan hingga layanan keuangan laku pandai.

Beberapa di antaranya menyesuaikan karakter wilayah. Misalnya di Tambak Kalisogo, koperasi bergerak di bidang peternakan ayam karena banyak anggotanya berprofesi sebagai peternak.

Pemkab Sidoarjo mencatat ada 16 KDKMP yang sudah mengajukan proposal pembiayaan ke Bank BRI sebagai bank Himbara penyulur. Dari jumlah itu, empat koperasi dinyatakan siap cair dan tinggal menunggu persetujuan pemerintah.

Untuk memperkuat kelembagaan, Pemkab Sidoarjo terus memberikan pendampingan kepada seluruh pengurus koperasi. Bahkan Subandi berencana menugaskan pegawai PPPK ke desa-desa guna membantu operasional KDKMP.

"Namun sebelum diturunkan, mereka harus mendapat pelatihan supaya bisa memberikan manfaat maksimal," tegasnya.

Ia juga memerintahkan camat, kepala desa, dan lurah untuk terus mendampingi pengurus koperasi. Pertemuan rutin diminta digelar di masing-masing koperasi, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring.

Pemkab juga berupaya membuka akses bagi pengurus koperasi untuk bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Bulog, agar koperasi bisa mendapatkan harga kulakan lebih murah.

Subandi turut mendorong kolaborasi antara koperasi dan dapur MBG (makan bersama gratis) di masing-masing desa. Koperasi dapat menyuplai kebutuhan seperti beras, telur, minyak goreng maupun kebutuhan dapur lainnya agar saling menguntungkan. (Ted)

Pemkab Sidoarjo Fokus Tangani Banjir



Pemkab melakukan pengeringan di sejumlah sungai yang ada di Sidoarjo untuk mempercepat penanganan banjir. (ist)

SIDOARJO, BN - Banjir masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Sidoarjo. Penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara lebih jelas, terstruktur, dan tepat sasaran baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Pemkab Sidoarjo kini tengah menyusun master plan penanganan banjir di Kota Delta. Dokumen ini diproyeksikan menjadi dasar kebijakan dan arah kerja dalam penanggulangan banjir.

Kepala Bappeda Sidoarjo, M Ainur Rahman, menyampaikan bahwa penyusunan master plan tersebut masih berlangsung. Prosesnya telah melalui pembahasan lintas instansi.

Menurutnya, penanganan banjir tidak hanya menjadi kewenangan pemkab, namun juga melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. "Karena itu dibutuhkan kolaborasi antarlembaga. Master plan ini disusun untuk penanganan banjir secara menyeluruh," ujarnya.

Dokumen tersebut mencakup pemetaan wilayah rawan banjir,

strategi teknis, serta kebijakan jangka panjang untuk menanggulangi banjir di Sidoarjo.

Ainur menegaskan bahwa nantinya master plan akan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan program penanganan banjir. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan dapat lebih terencana dan terukur.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi sempat turun langsung memantau kondisi banjir, pada Rabu malam (19/11). Ia meninjau aliran air dan memimpin penanganan darurat di sejumlah titik kritis banjir di kawasan perkotaan.

Dalam pemantauan tersebut, ditemukan tumpukan sampah dalam jumlah besar di sekitar Jembatan Kuthuk, Sidokare. Kondisi ini menyebabkan aliran air terhambat dari sungai maupun saluran drainase.

Bupati Subandi langsung menginstruksikan penggerahan alat berat serta percepatan pengeringan oleh DPUBMSDA. Pembersihan dilakukan hingga tengah malam dengan pengawasan

langsung di lapangan.

"Selain curah hujan tinggi, penyebab lain ada hambatan pada saluran air, sehingga aliran tidak mungkin cepat surut," tegasnya.

Selain pembersihan sampah dan pengoperasian pompa penyedot, pemkab juga melakukan pemetaan lanjut di titik rawan untuk perbaikan drainase secara bertahap. Masyarakat diimbau tetap waspada dan segera melapor ke call center 112 jika terjadi banjir akibat penyumbatan saluran.

(Ted)